

**PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**DENI AFNITA SIREGAR
NIM. 2350200004**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**PASCASARJANA EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah*



Oleh:

DENI AFNITA SIREGAR

NIM. 2350200004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



TESIS

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**DENI AFNITA SIREGAR
NIM. 2350200004**



PEMBIMBING I

**Prof. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199003 1 002**

PEMBIMBING II

**Dr. Utary Evy Cahyani, M.M
NIP. 19870521 201503 2 004**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

Hal : Lampiran Tesis
a.n. **Deni Afnita Siregar**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 24 Juni 2025
Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
di-
Padangsidempuan


Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap tesis **a.n. Deni Afnita Siregar yang berjudul "Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Padangsidempuan"**. Maka kami berpendapat bahwa tesis ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Magister Ekonomi (M.E) dalam Bidang Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Seiring dengan hal di atas, maka Saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang *munaqasyah* untuk mempertanggungjawabkan tesisnya ini. Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Prof. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199003 1 002


Dr. Utary Evy Cahyani, M.M
NIP. 19870521 201503 2 004



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Deni Afnita Siregar**
NIM : 2350200004
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 Juni 2025

Saya yang Menyatakan,



DENI AFNITA SIREGAR

NIM. 2350200004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DENI AFNITA SIREGAR**
NIM : 2350200004
Prodi : Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Padangsidempuan**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 25 Juni 2025

Yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUNAN



METERAL
TEMPEL

B2AMX284498622

DENI AFNITA SIREGAR

NIM. 2350200004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQOSYAH

Nama : Deni Afnita Siregar
NIM : 23 502 00004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Penguatan ekonomi Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Padangsidempuan

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dr. Utari Evi Cahyani, S.P, M.M (Penguji Metodologi / Ketua)	
2.	Dr. Purnama Hidayah Harahap, M.H (Penguji Isi dan Bahasa / Sekretaris)	
3.	Prof. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A (Penguji Umum / Anggota)	
4.	Dr. Sarmiana Batubara, M.A (Penguji ES / Anggota)	

Pelaksanaan Sidang Munaqosyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 23 Juni 2025
Pukul : 13.30 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 86,25





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan. T. Rizal Nuridin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : /Un.28/AL/PP/00.9/07/2025

Judul Tesis : PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTERM DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Ditulis Oleh : DENI AFNITA SIREAGAR
NIM : 22350200004

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.) dalam bidang studi Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 10 Juli 2025

Direktor,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Deni Afnita Siregar
NIM : 2350200004
Judul Tesis : Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Padangsidempuan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemiskinan ekstrem yang terjadi di Indonesia dimana peneliti berusaha menganalisis bagaimana strategi penguatan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan terkait seperti pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penguatan ekonomi yang dilakukan mencakup pelatihan keterampilan, pemberian bantuan modal usaha, serta fasilitasi akses pasar dan keuangan. Pelaksanaan program masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kelembagaan, sinergi antarlembaga, serta pemanfaatan pendekatan ekonomi syariah sebagai alternatif solusi dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis pada potensi lokal serta partisipasi aktif masyarakat Kota Padangsidempuan.

Kata Kunci: Ekonomi, Kemiskinan Ekstrem, Padangsidempuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

ABSTRACT

Name : Deni Afnita Siregar
NIM : 2350200004
Thesis Title : Community Economic Strengthening in Alleviating Extreme Poverty in Padangsidempuan City

This research is motivated by extreme poverty that occurs in Indonesia where the researcher seeks to analyze how the economic strengthening strategy implemented by the government in the context of alleviating extreme poverty in the city of Padangsidempuan. This study uses a qualitative approach with a descriptive method through in-depth interviews, observations, and documentation of related informants such as local governments. The results of the study show that the economic strengthening program carried out includes skills training, the provision of business capital assistance, and the facilitation of market and financial access. The implementation of the program still faces challenges such as budget limitations, lack of coordination between institutions, and low public financial literacy. This research recommends the importance of institutional strengthening, inter-institutional synergy, and the use of sharia economic approaches as alternative solutions in creating an inclusive and equitable economy. Efforts to alleviate extreme poverty require a comprehensive, integrated, and based strategy on local potential and the active participation of the people of Padangsidempuan City.

Keywords: Economy, Extreme Poverty, Padangsidempuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

تجريدي

الاسم : ديني أفنيتا سيريجار
النيم : ٤٠٠٠٢٠٥٣٢
عنوان الرسالة : تعزيز الاقتصاد المجتمعي في التخفيف من حدة الفقر المدقع في مدينة بادانجسيديمبوان

هذا البحث مدفوع بالفقر المدقع الذي يحدث في إندونيسيا حيث يسعى الباحث إلى تحليل كيفية تنفيذ استراتيجية التعزيز الاقتصادي من قبل الحكومة في سياق التخفيف من حدة الفقر المدقع في مدينة بادانجسيديمبوان. تستخدم هذه الدراسة نهجا نوعيا بأسلوب وصفي من خلال المقابلات المتعمقة والملاحظات وتوثيق المخبرين ذوي الصلة مثل الحكومات المحلية و بازناس. تظهر نتائج الدراسة أن برنامج التعزيز الاقتصادي الذي تم تنفيذه يشمل التدريب على المهارات ، وتقديم المساعدة في رأس المال التجاري ، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والمالية. لا يزال تنفيذ البرنامج يواجه تحديات مثل قيود الميزانية، ونقص التنسيق بين المؤسسات، وانخفاض محو الأمية المالية العامة. يوصي هذا البحث بأهمية التعزيز المؤسسي والتأزر بين المؤسسات واستخدام المقاربات الاقتصادية الشرعية كحل بديلة في خلق اقتصاد شامل وعادل. تتطلب الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الفقر المدقع استراتيجية شاملة ومتكاملة وقائمة على الإمكانيات المحلية والمشاركة النشطة لسكان مدينة بادانجسيديمبوان.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد ، الفقر المدقع ، بادانجسيديمبوان.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Padangsidimpuan”**, Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, serta Bapak Dr. Erawadi, MAg., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL selaku Direktur Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Ibu Dr. Rukiah, M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan

dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

3. Ibu Dr. Utari Evy Cahyani, S.P., M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidempuanI.
4. Bapak Prof. Dr. H. Arbannur Rasyid, M.A dan Ibu Dr. Utari Evy Cahyani, S.P, M.M selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
7. Teristimewa terima kasih kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda H. Muhammad Yusuf Siregar dan Ibunda Hj. Lanna Sari Siregar, B.A yang senantiasa memberikan doa di setiap sujud sehingga memudahkan langkah dalam penulisan tesis ini dan terima kasih juga khusus kepada suami tercinta H. Irjan Harahap, A. Md, anak-anakku tersayang Risyad Zaidan Harahap, S.

Pt, Rahma Aida Harahap, Raisah Arubini Harahap dan Rizki Ahmad Royhan Harahap yang telah memberi semangat dan dukungan yang luar biasa.

8. Terima kasih kepada responden yang telah meluangkan waktu dan kerjasamanya serta dukungannya sehingga bisa menulis tesis ini.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah Bapak/Ibu dan Saudara-Saudari berikan amat sangat berharga, peneliti mungkin tidak dapat membalasnya dan tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan Saudara-Saudari berikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki, sehingga peneliti masih perlu mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ilmiah ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, Juni 2025

Peneliti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DENI AFNITA SIREGAR

NIM. 2350200004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	ṣā	Ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	jīm	J	Je
ح	hā`	H	ha(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ş	es (dengan titik di bawahnya)
ض	dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge

فَا	fā`	F	Ef
قَا	qāf	Q	Qi
كَا	kāf	K	Ka
لَا	lām	L	El
مَا	mīm	M	Em
نَا	nūn	N	En
وَا	wāwu	W	We
هَا	hā`	H	Ha
ءَا	hamzah	'	<i>apostrof</i> , tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
يَا	yā`	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fathah	a	a
—/	Kasrah	i	i
—و	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ئ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ئ.....ئ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....و	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutahhidup yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah/h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penyuylisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tek terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Tranliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, 2003. Jakarta: Proyek Pengajian dan pengembangan Lektur Pendidikan Agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

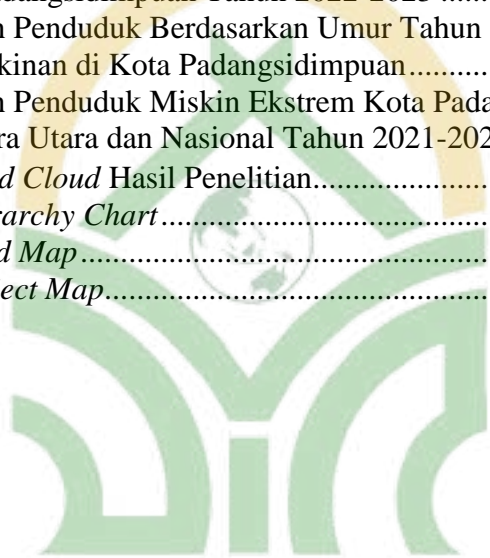
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	11
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	18
1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (<i>Grand Theory</i>)	18
a. Pengertian Kemiskinan.....	18
b. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem	25
c. Karakteristik Kemiskinan Ekstrem.....	26
d. Dampak Kemiskinan	26
e. Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Berbagai Negara.....	31
f. Strategi dan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kepmenko PMK No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedum P3KE.....	33
g. Kriteria Penduduk Miskin	36
h. Penyebab Kemiskinan	37
i. Klasifikasi Kemiskinan	39
2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	40
a. Pengertian Masyarakat	40
b. Ciri-Ciri Masyarakat.....	42
c. Masyarakat Islam	43
d. Penguatan Ekonomi Masyarakat	45
e. Penguatan Ekonomi Masyarakat	46
B. Penelitian Terdahulu.....	50
C. Kerangka Berpikir	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	63
B. Jenis Penelitian	63
C. Subjek Penelitian	63
D. Sumber Data	68

E. Teknik Pengumpulan Data	69
1. Observasi	69
2. Wawancara	69
3. Teknik Dokumentasi.....	69
4. <i>Focus Group Discussion</i>	69
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	70
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
1. Kota Padangsidempuan	75
2. Sejarah Kota Padangsidempuan	78
3. Kemiskinan di Kota Padangsidempuan	83
B. Hasil Penelitian.....	83
1. Penyebab Kenaikan Kemiskinan Ekstrem di Padangsidempuan Tahun 2022 -2023.....	85
2. Strategi Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Diterapkan di Kota Padangsidempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.....	88
3. Solusi yang Tepat Bagi Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem P3KE di Kota Padangsidempuan	92
C. Hasil Analisis Data Menggunakan Nvivo	96
1. <i>Word Cloud</i>	96
2. <i>Hierarchy Chart</i>	97
3. <i>Mind Map</i>	100
4. <i>Project Map</i>	101
D. Hasil Pembahasan Penelitian.....	102
1. Penyebab Kenaikan Kemiskinan Ekstrem di Padangsidempuan	102
2. Strategi Penguatan Ekonomi Masyarakat.....	107
3. Solusi yang Tepat Bagi Pemerintah.....	111
E. Keterbatasan Penelitian	115
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Implikasi Penelitian.....	117
C. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel I.1 Garis kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Padangsidempuan Tahun 2021-2023.....	4
Tabel I.2 Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Padangsidempuan tahun 2022-2023	5
Tabel I.3 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2021-2023	7
Tabel I.4 Sebaran P3KE Kota Padangsidempuan Tahun 2023	8
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel IV.1 Jumlah Kelurahan/ Desa dan Luas Wilayah Kota Padangsidempuan Berdasarkan Kecamatan	75
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Padangsidempuan Tahun 2022-2023	80
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2022-2023	81
Tabel IV.4 Kemiskinan di Kota Padangsidempuan.....	84
Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2021-2023.....	84
Gambar IV.1 <i>Word Cloud</i> Hasil Penelitian.....	97
Gambar IV.2 <i>Hierarchy Chart</i>	98
Gambar IV.3 <i>Mind Map</i>	100
Gambar IV.4 <i>Project Map</i>	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama pembangunan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,36% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25.898.550 jiwa. Di Sumatera Utara, tingkat kemiskinan yaitu sebesar 8,15% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.239.710 jiwa. Kota Padangsidempuan, tingkat kemiskinan mencapai 6,85% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 16.150 jiwa.¹ Meskipun tingkat kemiskinan di Padangsidempuan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi, tantangan dalam pengentasan kemiskinan tetap signifikan, terutama terkait kemiskinan ekstrem.

Istilah “kemiskinan ekstrem” mulai dikenal luas pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Popularitas istilah ini semakin meningkat setelah Bank Dunia mulai menerbitkan definisi serta data terkait kemiskinan ekstrem. Pada tahun 1990, Bank Dunia memperkenalkan garis kemiskinan internasional yang lebih ketat, di mana seseorang dianggap hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem jika pendapatannya kurang dari \$1 per hari, dengan mempertimbangkan inflasi dan paritas daya beli. Pemerintah telah menetapkan sasaran yang ambisius melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor

¹ www.bps.go.id diakses pada tanggal 18 Novmeber 2024 Pukul 13.06 WIB.

4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024. Instruksi ini menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk menangani kemiskinan secara menyeluruh, melalui intervensi yang didasarkan pada data dan penyediaan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu².

Indonesia berkomitmen untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2030, sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kemiskinan ekstrem, yang diukur sebagai kesejahteraan di bawah USD 1,9 PPP, tercatat sebesar 4 persen atau setara dengan 10,86 juta orang pada tahun 2021. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 10,14 persen atau 27,54 juta orang. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan menjadi 0,83 persen atau 2,3 juta orang, sementara jumlah penduduk miskin masih berada di angka 9,03 persen atau 25,22 juta orang. Dalam rencana strategisnya, Prabowo Subianto berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen dalam dua tahun pertama masa jabatannya dan menargetkan kemiskinan nasional mencapai 5 persen pada tahun 2029³.

Ardito Bhinadi menjelaskan dalam tulisannya tentang peran pemerintah kepada masyarakat miskin sebagai berikut:

² Joko Widodo, *Inpres Nomor 4 Tahun 2022*, 2022.

³ <https://tirto.id/beban-badan-percepatan-pengentasan-kemiskinan-di-era-prabowo> diakses pada tanggal 10 Desember 2024 Pukul 08.30 WIB.

“Pemerintah memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui perumusan dan implementasi kebijakan publik yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Peran ini meliputi penyediaan program sosial seperti bantuan langsung tunai, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”⁴

Menurut Ibnu Khaldun dalam tulisannya *Muqaddimah*, ia menjelaskan bahwa:

“Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah dan struktur ekonomi yang tidak adil. Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemerintahan yang kuat dan adil, sistem perpajakan yang tidak membebani rakyat, serta ekonomi berbasis produksi dan perdagangan”.⁵

Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqh Zakat* menekankan bahwa:

“Zakat bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga solusi sosial-ekonomi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sarana redistribusi kekayaan yang efektif untuk memberdayakan kaum *dhuafa* dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata”.⁶

Hal ini juga terlihat dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) No. 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Pedum P3KE) memberikan panduan teknis untuk pelaksanaan program ini. Keputusan Menteri ini menekankan pentingnya memastikan data yang tepat untuk menentukan siapa saja yang perlu dibantu, menggunakan informasi tersebut untuk memberikan bantuan yang sesuai, serta bekerja sama

⁴ Ardhito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Deepublish, 2017), hlm. 32.

⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah: An Introduction to History*, Terjemahan Franz Rosenthal (Princeton University Press, 1967), p. 46.

⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Its Rulings and Philosophies in the Light of the Qur'an and Sunnah*. (Dar Al-Tawhid, 1997), p. 65.

antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem.⁷

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan, yang dimana penghitungannya dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.⁸ Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan yang digunakan sebagai batas untuk mengklasifikasikan sebagai miskin atau tidak. Jika pengeluaran seseorang di bawah garis kemiskinan, maka orang tersebut dianggap miskin.

Tabel I.1 Garis kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Padangsidempuan Tahun 2021-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin)
2021	453.777	17,28	7,53
2022	480.196	16,03	6,89
2023	523.244	16,15	6,85

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Satgas P3KE Kemenko PMK tahun 2023/2024

Pada tabel I.1 terlihat bahwa garis kemiskinan di Kota Padangsidempuan terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa biaya hidup minimum yang dianggap layak semakin

⁷ Muhadjir Efendy, *Kepmenko PMK No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedum P3KE*, 2022.

⁸ Kota Padangsidempuan dalam Angka Tahun 2024

meningkat dari tahun ke tahun. Persentase penduduk miskin yang masih tinggi pada tahun 2021 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian dan mata pencaharian masyarakat, faktor inflasi dan perubahan harga barang dan jasa. Penurunan yang signifikan pada tahun 2022 menunjukkan adanya pemulihan atau efektifitas kebijakan yang berhasil menekan angka kemiskinan. Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di tahun 2023 bila dibandingkan tahun 2022 persentase penduduk miskin justru sedikit menurun, hal ini mengindikasikan pertumbuhan populasi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin.

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin dalam kemiskinan yang dialami, karena rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin dan semakin parah kondisi kemiskinan.

Tabel I.2 Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Padangsidempuan tahun 2022-2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan
2021	1,17	0,28
2022	0,80	0,12
2023	0,87	0,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan

Pada tabel I.2 terlihat bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 1,17 pada tahun 2021 menjadi 0,80 pada tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin yang menunjukkan adanya perbaikan yang cukup besar dalam mengurangi kedalaman kemiskinan, dimana rata-rata penduduk miskin menjadi lebih dekat ke garis kemiskinan, selanjutnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 0,87 ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan melebar kembali. Untuk nilai P2 pada tahun 2021 dengan nilai indeks 0,28 mengalami penurunan menjadi 0,12 pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ketidakmerataan tingkat kemiskinan di antara penduduk miskin berkurang secara substansial. Pada tahun 2023 nilai P2 meningkat menjadi 0,17 menunjukkan bahwa ketidakmerataan tingkat kemiskinan di antara penduduk miskin sedikit meningkat.

Kemiskinan dapat diidentifikasi melalui berbagai indikator, seperti luas lantai rumah $\leq 8 \text{ m}^2$ per kapita, lantai dan dinding dari bahan sederhana, serta tidak memiliki fasilitas buang air sendiri. Akses listrik terbatas, sumber air minum tidak terlindung, dan bahan bakar memasak masih menggunakan kayu bakar atau minyak tanah. Dari segi konsumsi, rumah tangga miskin hanya mampu makan 1-2 kali sehari, mengonsumsi daging/susu/ayam sekali seminggu, serta membeli pakaian sekali setahun. Mereka juga kesulitan membayar biaya pengobatan. Dari sisi ekonomi, kepala rumah tangga umumnya bekerja sebagai petani dengan lahan sempit, buruh tani, nelayan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.

Pendidikan rendah (tidak sekolah/tidak tamat SD) serta tidak memiliki tabungan atau aset berharga juga menjadi ciri kemiskinan. Jika sembilan dari indikator ini tidak terpenuhi, rumah tangga tersebut dikategorikan miskin.⁹

Kemiskinan Ekstrem Kota Padangsidimpuan dalam skala jika dibandingkan dengan skala provinsi dan nasional dapat dilihat dalam tabel I.1 berikut:

Tabel I.3 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2021-2023

Wilayah	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem						Target
	2021		2022		2023*		
Padangsidimpuan	1,60	3,668	0,19	442	0,39	930	0
Sumatera Utara	1,39	208,061	1,41	212,808	0,78	118,420	0
Nasional	2,14	5,800,040	2,04	5,590,720	1,12	3,340,000	0

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Satgas P3KE Kemenko PMK tahun 2023/2024

Tabel I.3 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, dan tingkat nasional dari tahun 2021 hingga tahun 2023, serta target penghapusan pada tahun 2024. Di Kota Padangsidimpuan, persentase penduduk miskin ekstrem menurun dari 1,60 persen dengan jumlah penduduk 3.668 jiwa pada tahun 2021 menjadi 0,19 persen dengan jumlah penduduk 442 jiwa pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,39 persen dengan jumlah penduduk 930 jiwa. Di tingkat Sumatera Utara, jumlahnya menurun dari 208.061 orang pada tahun 2021 menjadi 118.420 orang pada tahun 2023. Secara nasional, angka ini juga mengalami penurunan signifikan, dari 5.800.040 orang pada

⁹ Sherraden, *Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, hlm. 45.

tahun 2021 menjadi 3.340.000 orang pada tahun 2023. Target keseluruhan untuk tahun 2024 adalah menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen di semua wilayah.

Berikut data kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidimpuan berbasis keluarga dan individu dapat dilihat pada tabel I.4 berikut:

Tabel I.4 Sebaran P3KE Kota Padangsidimpuan Tahun 2023

No	Kecamatan	Keluarga						Individu					
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	%	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	%
1	Padangsidimpuan Utara	518	1.189	1.479	1.139	4.325	19,58	2.972	5.494	5.350	4.627	18.443	19,80
2	Padangsidimpuan Selatan	1.102	1.975	2.059	1.442	6.578	29,78	6.326	9.027	7.090	5.586	28.029	30,09
3	Padangsidimpuan Batunadua	448	985	971	675	3.079	13,98	2.493	4.539	3.522	2.610	13.164	14,13
4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	503	796	758	480	2.537	11,48	2.712	3.399	2.479	1.855	10.445	11,21
5	Padangsidimpuan Tenggara	757	1.188	1.295	844	4.084	18,49	4.216	5.166	4.427	3.173	16.982	18,23
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	348	479	410	252	1.489	6,74	1.825	2.028	1.302	929	6.084	6,53
Total		3,676	6.612	6.972	4.832	22.092	100	20.544	29.653	24.170	18.780	93.147	100

Sumber: Kemenko PMK tahun 2024

Berdasarkan data kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidimpuan tahun 2023, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan mencatat persentase tertinggi, yaitu 29,78% keluarga dari total 6.578 keluarga, atau 30,09% individu dari total 28.029 individu yang mengalami kemiskinan ekstrem. Di posisi kedua, Kecamatan Padangsidimpuan Utara mencatatkan 19,58% keluarga dari total 4.325 keluarga, atau 19,80% individu dari total 18.433 individu. Selanjutnya, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara berada di posisi ketiga dengan persentase 18,49% keluarga dari total 4.084 keluarga, atau 18,23% individu dari total 16.982 individu.

Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua mencatat persentase kemiskinan ekstrem sebesar 13,94% keluarga dari total 3.079 keluarga, atau 14,13% individu dari total 13.164 individu, menempatkannya di urutan keempat. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru berada di posisi kelima dengan

11,48% keluarga dari total 2.537 keluarga, atau 11,21% individu dari total 10.445 individu. Terakhir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu mencatat persentase terendah, yaitu 6,74% keluarga dari total 22.092 keluarga, atau 6,53% individu dari total 93.147 individu yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem. Urutan ini menunjukkan bahwa Padangsidimpuan Selatan memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang paling signifikan dibandingkan kecamatan lain, sementara Padangsidimpuan Angkola Julu mencatat tingkat kemiskinan ekstrem paling rendah.¹⁰

Beberapa konsep yang akan dikembangkan oleh pemerintah adalah memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan akses layanan sosial (PBB, 1996). Bank Dunia mendefinisikan penduduk miskin ekstrem sebagai mereka yang berpengeluaran di bawah USD 1,9 PPP atau Rp10.739 per hari, setara Rp322.170 per bulan. Jika satu keluarga beranggotakan empat orang memiliki pengeluaran di bawah Rp1.288.680 per bulan, maka mereka tergolong miskin ekstrem. Identifikasi kemiskinan ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi, termasuk pendapatan dan akses terhadap layanan dasar.

Penelitian mengenai *Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Padangsidimpuan* menjadi krusial karena adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan. Meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan strategis seperti Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dan Pedum P3KE, data menunjukkan bahwa jumlah

¹⁰ Data Sebaran P3KE Kota Padangsidimpuan tahun 2024.

penduduk miskin ekstrem di Kota Padangsidempuan justru mengalami peningkatan dari 442 jiwa pada tahun 2022 menjadi 930 jiwa pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang berjalan masih menghadapi tantangan implementasi, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, distribusi kemiskinan ekstrem yang terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, seperti Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi (30,09%), menunjukkan adanya faktor struktural yang memerlukan solusi berbasis penguatan ekonomi.

Pengentasan kemiskinan dalam Islam bertumpu pada prinsip kesejahteraan dan keadilan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam konsep zakat, infak, sedekah (ZIS), dan wakaf.¹¹ Strategi yang dapat diterapkan meliputi optimalisasi dana ZIS dan wakaf produktif untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga diarahkan sebagai modal usaha produktif yang berbasis syariah. Pemberdayaan UMKM berbasis syariah menjadi strategi utama dengan memberikan modal usaha melalui sistem *Qardhul Hasan* (pinjaman tanpa bunga) atau *mudharabah* (bagi hasil), sehingga masyarakat dapat berwirausaha tanpa terjerat praktik riba.¹²

¹¹ Utari Evy Cahyani, Itsla Yunisva Aviva, and Aisa Manilet, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga', *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5.1 (2019), hlm. 39–58 (hlm. 42).

¹² Agus Eko Nugroho and others, 'Analisis Permasalahan Kemiskinan', in *Anti Kemiskinan Reproduksi Modal Sosial (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan)*, 1st edn (LPPI Press, 2010), hlm. 54.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dan data yang dipaparkan di atas maka terjadi GAP antara teori dengan kenyataan di lapangan. Sehingga penelitian ini berusaha menganalisis sejauh mana pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dan Pedum P3KE untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Padangsidimpuan**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka fokus masalah di dalam penelitian ini hanya meneliti mengenai penguatan penguatan ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidimpuan dengan subjek penelitian Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas ketenagakerjaan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian Daerah Kota Padangsidimpuan, Ketua Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan Periode 2018 – 2023 sekaligus tergabung dalam Badan Anggaran dan Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan fokus masalah di atas agar tidak terjadi kesukaran makna beberapa kata di dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi

Penguatan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, daerah, atau komunitas melalui berbagai strategi dan kebijakan.¹³

2. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah aktivitas dan upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok atau komunitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, jasa, industri kecil, atau usaha mikro. Fokusnya adalah pada peran masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan peluang kerja, dan mendukung perkembangan ekonomi lokal.¹⁴

3. Pengentasan

Pengentasan adalah proses atau upaya untuk mengatasi dan menghilangkan suatu masalah atau kondisi yang tidak diinginkan, seperti kemiskinan, kebodohan, atau ketertinggalan. Dalam konteks sosial dan ekonomi, pengentasan sering merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki taraf hidup, seperti program pemberdayaan, bantuan sosial, pendidikan, atau pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah

¹³ Achmad Zaki Yamani, Arif Wirawan Muhammad, and Muhammad Nur Faiz, 'Penguatan Ekonomi Lokal Pada Pelaku UMKM Berbasis Digital Di Desa Winduaji Kabupaten Brebes', *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 1.1 (2019), pp. 24–28 (p. 25), doi:10.35970/madani.v1i1.29.

¹⁴ Muh Izza M.S.I, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Ideologis Islam* (Penerbit NEM, 2021), hlm. 25.

membantu individu atau kelompok mencapai kehidupan yang lebih baik dan mandiri.¹⁵

4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, akibat keterbatasan sumber daya ekonomi.¹⁶

5. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga hidup di bawah tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, air bersih, dan layanan kesehatan. Menurut standar internasional, berdasarkan laporan terbarunya, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US\$ 2,15 per orang per hari dari sebelumnya di level US\$ 1,90 PPP (Purchasing Power Parity) per orang per hari, atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan. Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.¹⁷

¹⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pustaka, 2017), hlm. 14.

¹⁶ Nugroho and others, 'Analisis Permasalahan Kemiskinan', p. 35.

¹⁷ Muhadjir Efendy, *Kepmenko PMK No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedum P3KE*, 2022

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan definisi operasional variabel di atas maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi penyebab kenaikan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan tahun 2022 -2023?
2. Bagaimana strategi penguatan ekonomi masyarakat yang diterapkan di Kota Padangsidempuan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem?
3. Bagaimana solusi yang tepat bagi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem P3KE di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab kenaikan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan tahun 2022 -2023.
2. Untuk menganalisis strategi penguatan ekonomi masyarakat yang diterapkan di Kota Padangsidempuan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
3. Untuk menganalisis solusi yang tepat bagi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem P3KE di Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan teori terkait pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya dalam konteks penguatan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang berminat mengkaji isu serupa.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a) Memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah Kota Padangsidempuan dalam merancang kebijakan dan program pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor.
- b) Memberikan panduan kepada masyarakat lokal dan organisasi kemasyarakatan untuk berkontribusi aktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi.
- c) Menjadi masukan bagi lembaga pemerintah dan swasta dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif.

3. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, serta membangun solidaritas dan kolaborasi untuk menciptakan perubahan sosial yang positif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan peneliti untuk mempermudah peneliti dalam menyusun tesis. Peneliti mengklasifikasikan sistematika pembahasan kedalam tiga bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang yang melatar belakangi suatu masalah untuk diteliti.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang membahas tentang teori (Tinjauan Umum) tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir. Secara umum, seluruh sub bahasan yang terdapat dalam landasan teori ini membahas tentang penjelasan mengenai variable penelitian secara teori yang dijelaskan dalam kerangka teori.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Secara Umum seluruh sub bahasan yang ada dalam metode penelitian serta membahas tentang lokasi serta jenis penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Bab ini menyajikan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, baik melalui observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara mendalam sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam bab ini dijelaskan secara terperinci bagaimana fenomena kemiskinan ekstrem di Kota

Padangsidempuan terjadi, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, strategi-strategi yang telah dan sedang dilakukan oleh berbagai pihak dalam upaya pengentasan, serta berbagai solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi rangkuman secara menyeluruh terhadap hasil temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini juga menyajikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif, baik kepada pemerintah, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait lainnya, sebagai kontribusi peneliti dalam merespon permasalahan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Kota Padangsidempuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (*Grand Theory*)

a. Pengertian Kemiskinan

Salah satu masalah yang dimiliki manusia, yang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, tetapi sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah, ialah kemiskinan. Kemiskinan asal kata dari miskin berarti melarat lawan dari kaya.¹⁸ Jadi kemiskinan berarti kemelaratan, tidak kaya dan sebagainya.

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dapat dijumpai pada setiap masyarakat di sepanjang sejarah. Kemiskinan terjadi disebabkan beberapa hal seperti rendahnya akses layanan kesehatan dan Pendidikan , tidak adanya sistem ekonomi dan pemerintahan yang baik, terjadi penindasan satu golongan terhadap golongan lain, timbulnya kemalasan dan hilangnya semangat untuk berusaha. Kemiskinan dengan segala penyebabnya tidak dapat dipisahkan dari adanya pengaruh setiap individu atau masyarakat yang sangat lemah nilai akhlak dan spritualnya.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya, bagi mereka yang tergolong miskin, mereka

¹⁸ Departemen Pendidikan dan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal 421

sendiri merasakan dalam menjalani kehidupan dalam kemiskinan tersebut. Kemiskinan akan lebih terasa apabila mereka telah membandingkannya dengan kehidupan orang lain yang lebih tinggi tingkat kehidupannya.¹⁹ Dalam buku karangan Yusuf Qardawi dengan judul bukunya Kiat Islam mengentaskan kemiskinan, membahas antara lain bahwa kemiskinan dapat membuat orang menjadi tunduk, hina dan dapat menjerumuskan umat ke lembah kemusyrikan dan penderitaan, sehingga Islam menghendaki agar manusia senantiasa berada pada martabat yang tinggi dan luhur.²⁰

Sedangkan pengertian kemiskinan menurut Islam, miskin berasal dari Bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kemiskinan yang sangat. Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: al-faqr, berarti membutuhkan (alhtiyaaj). Kemiskinan menurut penyebabnya terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.²¹

¹⁹ Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar (Cet.4; Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003). Hal 326

²⁰ Muhammad Yusuf Qardhawi. Kiat Islam mengentaskan kemiskinan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm.45.

²¹ Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Jurnal Hukum Islam, 13(1), 47-56.

Imam Al-Ghazali (1058-1111 M), seorang ulama besar dan pemikir Islam, memiliki pandangan yang mendalam mengenai kemiskinan, yang tidak hanya berfokus pada dimensi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek moral, spiritual, dan sosial. Dalam pandangannya, kemiskinan dapat berperan sebagai ujian spiritual yang berhubungan erat dengan kualitas iman seseorang. Namun, ia juga mengakui bahwa kemiskinan yang parah dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dapat mengarah pada kerusakan sosial dan spiritual, baik individu maupun masyarakat. Al-Ghazali melihat kemiskinan sebagai ujian dari Allah yang harus dihadapi dengan sabar dan tawakkal, namun ia juga mengakui bahwa kemiskinan yang ekstrem dapat menurunkan martabat seseorang dan merusak struktur sosial. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya redistribusi kekayaan, kerjasama sosial, dan pembinaan moral untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.²²

Fazlur Rahman, seorang intelektual Pakistan, dalam karyanya berpendapat bahwa Islam memberikan panduan untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan inklusif, yang tidak hanya memperhatikan aspek distribusi kekayaan tetapi juga kesejahteraan sosial. Rahman menyarankan bahwa Islam mendorong sistem ekonomi yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa kemiskinan dapat

²² Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din (Revival of the Religious Sciences)*, vol. 2 (Beirut: Dar al Ma'arif, 1991), 343-345

diatasi dengan menerapkan sistem zakat yang efektif dan memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya²³

Kemiskinan memiliki banyak dimensi, dan mendefinisikan kemiskinan menjadi tantangan baik secara konsep maupun praktik. Hal ini mencakup pertanyaan tentang siapa yang layak dianggap sebagai penduduk miskin, serta berbagai aspek kehidupan masyarakat miskin, seperti keterbatasan akses ke pasar dan rendahnya kualitas infrastruktur yang mereka.²⁴

Ardito Bhinadi menjelaskan dalam tulisannya tentang peran pemerintah kepada masyarakat miskin sebagai berikut:

“Pemerintah memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui perumusan dan implementasi kebijakan publik yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Peran ini meliputi penyediaan program sosial seperti bantuan langsung tunai, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”²⁵

Menurut Ibnu Khaldun dalam tulisannya *Muqaddimah*, ia menjelaskan bahwa:

“Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah dan struktur ekonomi yang tidak adil. Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemerintahan yang kuat dan adil, sistem perpajakan yang tidak membebani rakyat, serta ekonomi berbasis produksi dan perdagangan”.²⁶

²³ Fazlur Rahman, *Islamic Thought: An Introduction* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 122-125

²⁴ Michael Sherraden, *Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, terj Siroj (Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 55.

²⁵ Ardhito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Deepublish, 2017), hlm. 32.

²⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah: An Introduction to History*, p. 46.

Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqh Zakat* menekankan bahwa:

“Zakat bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga solusi sosial-ekonomi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sarana redistribusi kekayaan yang efektif untuk memberdayakan kaum *dhuafa* dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata”.²⁷

Konsep Islam dalam mengentaskan kemiskinan berfokus pada prinsip keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera, dan kemiskinan harus diatasi melalui berbagai instrumen sosial-ekonomi, seperti zakat, infak, sedekah, dan *waqf*.²⁸

- 1) Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terpinggirkan. Zakat merupakan redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan membantu pengentasan kemiskinan ekstrem.
- 2) Infak dan sedekah adalah pemberian sukarela oleh individu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pemberian ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial dan memberikan dukungan finansial bagi mereka yang kurang mampu.

²⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Its Rulings and Philosophies in the Light of the Qur'an and Sunnah.*, p. 65.

²⁸ Naila Iqbal Qureshi Khan, 'Waqf and Development: A Study of Economic Potential of Waqf in Bhopal, Madhya Pradesh', in *Advances in Finance, Accounting, and Economics*, ed. by Buerhan Saiti and Adel Sarea (IGI Global, 2020), pp. 72–99 (p. 75) [accessed 19 December 2022].

- 3) *Waqf* adalah sumbangan harta untuk digunakan secara terus-menerus dalam kepentingan umum, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. *Waqf* dapat menjadi sumber daya yang sangat membantu dalam menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat miskin.
- 4) Islam juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi melalui usaha mandiri, seperti mengembangkan usaha mikro dan kecil, menyediakan pelatihan keterampilan, serta memberikan akses kepada lapangan pekerjaan yang layak.²⁹

Kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang layak dan bermartabat.³⁰ Hak-hak dasar tersebut antara lain:³¹

- 1) Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 2) Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan.
- 3) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan kini dipahami tidak hanya sebagai ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi juga sebagai kegagalan dalam memenuhi hak-hak

²⁹ Qureshi Khan, 'Waqf and Development', p. 76.

³⁰ Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, 'Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.1 (2022), hlm. 43–62.

³¹ Felinda Wulandari, Yamardi Yamardi, and Titin Rohayatin, 'Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat', *Jurnal Caraka Prabhu*, 4.1 (2020), hlm. 31–46.

dasar dan adanya perlakuan tidak setara terhadap individu atau kelompok dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar ini saling berkaitan, sehingga jika satu hak tidak terpenuhi, hal tersebut dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya.³²

Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan dengan standar hidup yang rendah, yaitu kekurangan materi yang dialami oleh sekelompok orang jika dibandingkan dengan standar hidup yang umum berlaku di masyarakat tersebut. Kondisi ini berdampak langsung pada tingkat kesehatan, moral, dan rasa harga diri individu yang termasuk dalam kategori miskin.³³

Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan minimum, yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini terdiri dari dua komponen utama: garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Menurut Badan Pusat Statistik, kebutuhan minimum makanan didasarkan pada konsumsi 52 jenis bahan makanan dengan tingkat energi minimal 2.100 kalori per kapita per hari, yang disesuaikan dengan harga yang berlaku. Sementara itu, garis kemiskinan non-makanan mencakup 27 jenis komoditas untuk perkotaan dan 25 jenis komoditas untuk perdesaan, yang merepresentasikan pola konsumsi masyarakat berpenghasilan

³² Rizqi Hary Kurniawan and others, 'Problematika Anak Tidak Sekolah (ATS) Sebagai Faktor Pemicu Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting', *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.2 (2022), phlm. 70–74.

³³ Hesty Heryani, Arif Rahman Hakim, and Panggih Prabowo Rona Saputra, 'Pendampingan Dari Diagnosis Implementasi Green House Level Medium Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem', *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 3.3 (2024), hlm. 555.

rendah. Batas kebutuhan non-makanan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan berbagai barang serta jasa lainnya.³⁴

b. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem

Adapun konsep dan definisi kemiskinan ekstrem dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁵

- 1) Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).
- 2) Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana, apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.
- 3) Identifikasi penduduk miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi.

³⁴ Heryani, Hakim, and Saputra, 'Pendampingan Dari Diagnosis Implementasi Green House Level Medium Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem', hlm. 556.

³⁵ Muhadjir Efendy, *Kepmenko PMK No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedum P3KE*, hlm. 5.

c. Karakteristik Kemiskinan Ekstrem

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Susenas Maret 2021 menunjukkan:³⁶

- 1) Angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,14% dari total penduduk Indonesia;
- 2) Sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga miskin ekstrem, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD.
- 3) Sekitar satu dari tujuh kepala rumah tangga miskin ekstrem adalah perempuan.
- 4) Sekitar satu di antara lima rumah tangga miskin ekstrem memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas.
- 5) Sekitar satu di antara dua rumah tangga miskin ekstrem tidak mendapat akses terhadap sanitasi layak; dan
- 6) Sekitar satu di antara tujuh rumah tangga miskin ekstrem tidak memiliki toilet.

d. Dampak Kemiskinan

Adapun beberapa dampak dari terjadi kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan Membahayakan Akidah

³⁶ Muhadjir Efendy, *Kepmenko PMK No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedum P3KE*, hlm. 5.

Kemiskinan merupakan ancaman yang sangat serius terhadap akidah, khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan kaum berada yang berlaku aniaya. Terlebih lagi jika kaum dhuafa ini bekerja dengan susah payah sementara golongan kaya hanya bersenang-senang. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan dapat menebarkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan ilahi mengenai pembagian rezeki. Kecenderungan tersebut setidaknya dapat menyebabkan seseorang kufur terhadap nikmat, hasad, hasud dan dengki. Disebabkan kemiskinan seseorang dapat melakukan persepsi yang salah tentang keadilan Allah, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk hidup. Rasulullah saw. pun berlindung kepada Allah dari kemiskinan dan kekafiran, dalam hadist Abu Dawud berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kemiskinan”. (HR. Abu Dawud No. 1544)³⁷

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, Islam menegaskan kemiskinan sering kali menjadi awal, bahkan penyebab kekufuran. Bagi kalangan yang tidak mempedulikan kaum miskin, ia termasuk golongan yang mendustakan agama.

وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ مَنْ بَاتَ شَبَعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

³⁷ www.hadist.id diakses pada tanggal 07 Mei 2025 pada pukul 01.31 WIB.

Artinya: “Demi Allah, tidak beriman seseorang yang tidur dengan perut kenyang, sementara ia tahu tetangganya menangis kelaparan.” (HR. At-Thabrani)³⁸

2) Kemiskinan Membahayakan Akhlak dan Moral

Selain berbahaya terhadap akidah dan keimanan, kemiskinan pun berbahaya terhadap akhlak dan moral. Kemelaratan dan kesengsaraan seseorang khususnya apabila ia hidup di lingkungan golongan kaya yang tamak sering mendorongnya melakukan tindak pelanggaran. Sebuah ungkapan menyebutkan, suara perut dapat mengalahkan suara nurani. Kondisi terjepit seperti ini menggiring orang Islam yang fakir tersebut berpindah agama.

3) Kemiskinan Mengancam Kestabilan Pemikiran

Malapetaka kemiskinan dan kemiskinan tidak hanya terbatas pada sisi rohani dan akhlak. Bahayanya juga mengancam sisi pemikiran manusia. Bagaimana mungkin seorang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya beserta segenap keluarga dapat berpikir dengan baik, apalagi jika tetangganya hidup mewah? Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, sahabat sekaligus murid Imam Abu Hanifah, meriwayatkan bahwa pada suatu hari pembantu rumah tangganya menemuinya di dalam suatu majelis untuk memberitahukan bahwa beras sudah habis. Imam asy-Syaibani gusar dan berkata kepadanya, “Celaka kamu! Kamu telah menghilangkan empat puluh masalah fiqih dari dalam benakku.” Dirawikan pula dan

³⁸ www.hadist.id diakses pada tanggal 07 Mei 2025 pada pukul 01.31 WIB.

Imam Besar Abu Hanifah bahwa beliau berkata, “Jangan bermusyawarah dengan orang yang sedang tidak punya beras.” Maksudnya, jangan bermusyawarah dengan orang yang pikirannya sedang kacau. Menurut ilmu jiwa, tekanan (*stres*) berat berpengaruh terhadap kehalusan perasaan dan ketajaman pikiran. Hadis Sahih riwayat Imam Bukhari mengatakan, Rasulullah bersabda:

لَا يَفْضِيَنَّ حَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ

Artinya: “Seorang hakim dilarang memutuskan (perkara putusan) antara dua orang ketika marah. (HR. Bukhori Nomor 7158)”³⁹

4) Kemiskinan Membahayakan Keluarga

Kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Dari sisi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan, karena tidak dapat memenuhi berbagai syarat seperti mahar, nafkah, dan kemandirian ekonomi.

Pendekatan Al-Ghazali dalam *maqashid syariah* memberikan landasan yang kuat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam pemikiran Al-Ghazali, tujuan utama syariat Islam adalah untuk menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kemiskinan ekstrem, yang menyebabkan

³⁹ www.hadist.id diakses pada tanggal 07 Mei 2025 pada pukul 01.31 WIB.

seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, secara langsung mengancam keberlangsungan hidup (jiwa) dan kelayakan hidup manusia. Sehingga, upaya untuk mengatasi kemiskinan Pendekatan Al-Ghazali dalam *maqashid syariah* memberikan landasan yang kuat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam pemikiran Al-Ghazali, tujuan utama syariat Islam adalah untuk menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kemiskinan ekstrem, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, secara langsung mengancam keberlangsungan hidup (jiwa) dan kelayakan hidup manusia. Sehingga, upaya untuk mengatasi kemiskinan.⁴⁰

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil sebagai upaya menjaga kestabilan sosial dan mencegah kerusakan (*fasad*) dalam masyarakat. Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan infaq dipandang sebagai cara konkret untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengangkat martabat kaum miskin. Ia berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kebutuhan rakyat miskin serta mencegah praktik-praktik ekonomi yang menindas, seperti monopoli dan korupsi.

⁴⁰ Prayogo Harto, Annisa Fadhillah, and Ahmad Baehaqi, 'Keadilan Sosial Dalam Bingkai Maqashid

Kemiskinan yang dibiarkan berarti pembiaran atas pelanggaran terhadap *maqashid syariah* itu sendiri, karena berdampak pada rusaknya kehidupan individu dan masyarakat secara luas.⁴¹

Kerangka pemikiran Al-Ghazali, pengentasan kemiskinan ekstrem adalah kewajiban moral, sosial, dan agama. Hal ini sejalan dengan esensi syariat Islam yang tidak hanya bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan dunia. Keberhasilan suatu masyarakat dalam mengatasi kemiskinan menjadi indikator penting bahwa *maqashid syariah* telah diterapkan secara utuh dan bermakna.⁴²

e. Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dari Berbagai Negara

Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yang diterapkan di berbagai negara dapat dirangkum sebagai berikut:⁴³

1) Global

Pendekatan global mencakup program perlindungan sosial seperti bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial (jamsos),

⁴¹ Al-Ghazali juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil sebagai upaya menjaga kestabilan sosial dan mencegah kerusakan (*fasad*) dalam masyarakat. Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan infaq dipandang sebagai cara konkret untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengangkat martabat kaum miskin. Ia berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kebutuhan rakyat miskin serta mencegah praktik-praktik ekonomi yang menindas, seperti monopoli dan korupsi. Kemiskinan yang dibiarkan berarti pembiaran atas pelanggaran terhadap *maqashid syariah* itu sendiri, karena berdampak pada rusaknya kehidupan individu dan masyarakat secara luas

⁴² Prayogo Harto, Annisa Fadhillah, and Ahmad Baehaqi, hlm. 147.

⁴³ Muhadjir Efendy, *Kepmenko PMK No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedum P3KE*, hlm. 6.

peningkatan penghidupan, akses pendidikan dan layanan kesehatan, sanitasi, penyediaan rumah layak huni, serta berbagai inisiatif lainnya.

2) Indonesia

Berdasarkan Instruksi Presiden Indonesia melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Strategi ini diimplementasikan dalam berbagai kebijakan antara lain program perlindungan sosial, seperti Bansos-PKH, PIP, BLT Sembako, serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat inisiatif lain seperti pengembangan BUMDes, KUR, program padat karya, Prakerja, UMi, asuransi untuk peternak, petani, dan nelayan. Negara juga menyediakan pendidikan gratis, program JKN, pembangunan infrastruktur, sanitasi, rumah layak huni, serta promosi program keluarga berencana (KB).

3) Cina

Cina mengadopsi pendekatan yang mencakup Dibao (program bantuan sosial berbasis pendapatan minimum), pensiun dasar, pembangunan industri lokal, akses ke pinjaman, subsidi, kredit, dan bantuan kompensasi ekologi. Selain itu, strategi mereka meliputi

relokasi penduduk, pendidikan gratis, layanan kesehatan dasar, rumah aman, akses ke listrik dan air, serta pengembangan infrastruktur.

4) India

India mengandalkan program-program seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan dasar, rumah aman, akses ke listrik dan air bersih, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, terdapat program padat karya MGNREGA, akses ke pinjaman, peningkatan keterampilan teknis di sektor pertanian, promosi pendidikan, dan program keluarga berencana (KB). Pemerintah juga fokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

5) Vietnam

Vietnam melaksanakan program jaminan sosial yang mencakup kesehatan dan jaminan pengangguran, serta bantuan sosial untuk lansia (80 tahun ke atas), penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Negara ini juga memiliki program berbasis wilayah untuk mitigasi bencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Strategi dan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan Kepmenko PMK No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedum P3KE

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui:

- a) Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;
- b) Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler, dan Bantuan Beras;
- c) Bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia)
- d) Subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan
- e) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN).

2) Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:

- a) Peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
 - b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi;
 - c) Peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan⁴⁴
 - d) Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.⁴⁵

⁴⁴ Ja'far Nasution and others, 'Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner', 1.5 (2022), hlm. 271–80 (hlm. 275).

⁴⁵ Muhadjir Efendy, *Kepmenko PMK No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedum P3KE*, hlm. 6.

g. Kriteria Penduduk Miskin

Penduduk miskin atau penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah individu dengan pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan. Kriteria penduduk miskin menurut BPS-SU (2005) sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Luas lantai perkapita : $\leq 8 \text{ m}^2$,
- 2) Jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bambu/kayu murahan,
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/bersama-sama dengan rumah tangga lain,
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain,
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum/ketersediaan air bersih : air hujan/ sumur / mata air tidak terlindung.
- 7) Bahan bakar memasak sehari- hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah,
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun,
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari,
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik,
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani : dengan luas lahan 500m^2 , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh

⁴⁶ Sherraden, *Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, hlm. 45.

perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 per bulan.

- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel tak terpenuhi maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

h. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan modal, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya daya saing hasil produksi, serta terbatasnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dan ketidakberdayaan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Secara mikro, dapat disebabkan oleh ketimpangan dalam pola kepemilikan sumber daya, yang pada akhirnya menciptakan distribusi pendapatan yang tidak merata. Penduduk miskin umumnya memiliki sumber daya yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.⁴⁷

⁴⁷ MK Hadi, 'Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab', *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, Query vol.1, no.1, hlm. 217.

Penyebab pertama kemiskinan adalah ketimpangan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada rendahnya produktivitas, yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya pendapatan atau upah. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, nasib kurang beruntung, diskriminasi, atau kondisi keturunan turut berkontribusi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Penyebab kedua adalah ketimpangan dalam akses terhadap modal. Ketiga penyebab ini kemudian mengarah pada teori lingkaran setan kemiskinan, yang menyatakan bahwa sebuah negara miskin tetap miskin karena memang sudah miskin. Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal mengakibatkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan yang juga rendah, yang kemudian membatasi kemampuan menabung dan berinvestasi, sehingga terus memperkuat lingkaran kemiskinan.

Fenomena lingkaran kemiskinan ini sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, di mana penyebab kemiskinan juga menjadi akibat dari kemiskinan itu sendiri. Untuk memutus lingkaran ini, pemerintah perlu menerapkan kebijakan anti kemiskinan yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, pembangunan prasarana dasar, restrukturisasi ekonomi, dan peningkatan pendapatan daerah. Langkah ini memungkinkan daerah keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya dapat diukur melalui tingkat pendapatan atau kepuasan dari barang-barang yang dimiliki. Yang lebih penting adalah apa yang dapat dilakukan seseorang dengan barang tersebut. Untuk memahami konsep kesejahteraan secara menyeluruh dan kemiskinan secara khusus, diperlukan pendekatan yang melampaui sekadar ketersediaan barang atau komoditas serta fungsinya.⁴⁸

i. Klasifikasi Kemiskinan

Berdasarkan penjelasan di atas kemiskinan dapat juga diklasifikasikan menjadi lima kelas, yaitu:⁴⁹

- 1) Kemiskinan Absolut, selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang tidak mengacu atau tidak didasarkan pada garis kemiskinan.
- 2) Kemiskinan Relatif, apabila pendapatan sekelompok orang dalam masyarakat lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka termasuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Penekanannya adalah adanya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin atau dikenal dengan istilah adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

⁴⁸ Agus Eko Nugroho and others, 'Analisis Permasalahan Kemiskinan', in *Anti Kemiskinan Reproduksi Modal Sosial (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan)*, 1st edn (LPPI Press, 2010), hlm. 15.

⁴⁹ Agus Eko Nugroho and others, hlm. 20.

- 3) Kemiskinan Struktural, mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
- 4) Kemiskinan Kronis, dibedakan tiga berdasarkan penyebabnya yaitu:
 - a) Kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif.
 - b) Keterbatasan sumber daya dan keterisolasian (daerah-daerah yang kritis akan sumber daya alam dan daerah terpencil).
 - c) Rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.
- 5) Kemiskinan Sementara, terjadi akibat adanya : perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman, dan bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Penguatan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang membentuk suatu organisasi sosial yang kompleks. Dalam organisasi ini, terdapat nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban dan

tanggung jawab, baik secara individu maupun bersama-sama, untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program, termasuk di bidang kesehatan.⁵⁰

Istilah masyarakat, yang dalam bahasa Inggris disebut *society*, berasal dari kata yang bermakna kawan. Dalam bahasa Arab, istilah ini mengacu pada konsep ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat dapat dipahami sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi.⁵¹

Menurut Moeflich Hasbullah masyarakat adalah sebuah sistem hubungan manusia yang luas dan kompleks. Kompleksitas ini menggambarkan bagaimana bagian-bagian masyarakat saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Sebagaimana tubuh manusia terdiri atas organ-organ yang saling bekerja sama, seperti jantung, hati, otak, dan paru-paru, masyarakat juga terdiri atas berbagai hubungan sosial, seperti hubungan antara orang tua dan anak, guru dan murid, serta atasan dan bawahan. Keseluruhan hubungan inilah yang membentuk masyarakat secara utuh.⁵²

⁵⁰ Alexander Lucas Riyadi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Andi Offset, 2016), hlm. 258.

⁵¹ Moh. Ali Aziz, *Pendekatan Sosio-Kultural Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Dalam Suhartini, Dkk (Ed.), *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat* (Pustaka Pesantren : Distribusi, LKiS Pelangsi Aksara, 2005), hlm. 25.

⁵² Moeflich Hasbullah, *Islam Dan Transformasi Masyarakat Nusantara* (Kencana, 2021), hlm. 20.

b. Ciri-Ciri Masyarakat

Harry Hikmat mengemukakan bahwa masyarakat memiliki beberapa ciri utama, yaitu:⁵³

- 1) Adanya interaksi antar anggota masyarakat.
- 2) Kehadiran adat istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khas yang mengatur pola perilaku warganya, baik di kota maupun di desa.
- 3) Identitas yang menjadi pengikat seluruh warga.

Berbagai definisi tentang masyarakat telah dikemukakan oleh para ahli. Masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, relatif mandiri, mendiami wilayah tertentu, memiliki budaya yang sama, dan menjalankan sebagian besar aktivitas mereka dalam kelompok tersebut.⁵⁴ Masyarakat adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka mampu mengatur diri sendiri dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas.⁵⁵

Azis mengidentifikasi beberapa unsur masyarakat yang dijelaskan sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Kumpulan manusia yang hidup bersama.
- 2) Kehidupan bersama yang berlangsung cukup lama.
- 3) Kesadaran bersama sebagai satu kesatuan.

⁵³ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Humaniora Utama Press, 2010), hlm. 50.

⁵⁴ Aziz, *Pendekatan Sosio-Kultural Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Dalam Suhartini, Dkk (Ed.), *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 36.

⁵⁵ Aziz, hlm. 37.

⁵⁶ Aziz, hlm. 38.

4) Adanya sistem yang memungkinkan mereka hidup berdampingan.

Ciri-ciri tersebut sejalan dengan pengertian masyarakat sebagai sekelompok manusia yang tersebar, namun memiliki berbagai adat, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Dalam setiap zaman dan tempat, masyarakat selalu berupaya mencapai kehidupan yang lebih baik, serta bebas dari berbagai bentuk tekanan sosial.

c. Masyarakat Islam

Secara bahasa, Islam berarti kedamaian, ketaatan, keamanan, dan kesucian. Sementara itu, secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup hingga akhir zaman, yang bertujuan untuk membawa kebahagiaan dan perdamaian, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁷ Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Anfal: 61 dan QS. Al-Hujurat: 9 sebagai berikut:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١﴾

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵⁸

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi

⁵⁷ Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi*, Cet. 1 (Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 27.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bintang Indonesia, 2022).

kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁵⁹

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian. Dalam bahasa Arab, kata Islam berasal dari akar kata kerja *salama*, yang bermakna menyerahkan, kemurnian, dan kesejahteraan. Islam berasal dari kata *aslama-yuslimu-islaman fahuwa muslimun*, yang berarti penyerahan diri atau pasrah. Islam berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman*, yang berarti menciptakan kedamaian atau keselamatan.

Masyarakat Muslim didefinisikan sebagai kelompok manusia yang nyata keberadaannya dalam komunitas Muslim dan memiliki kebiasaan, adat istiadat, perilaku, dan perasaan yang sama, mencerminkan nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas penduduk. Pandangan Islam, masyarakat berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam, termasuk kehidupan bersama. Sehingga, masyarakat harus menjadi landasan bagi kehidupan duniawi yang mendorong kesatuan dan kerja sama umat, guna mewujudkan pertumbuhan manusia yang mencerminkan persamaan dan keadilan. Jika masyarakat dipenuhi dengan dendam akibat ketidakadilan sosial atau perlakuan buruk antar

⁵⁹ Departemen Agama RI.

individu, maka masyarakat tersebut tidak dapat disebut sebagai masyarakat Islam.⁶⁰

d. Pandangan Islam terhadap Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau ada yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural).⁶¹

Kemiskinan adalah akar kata dari “miskin” dengan awalan ke dan akhiran an yang menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan “kefakiran” yang berasal dari asal kata “fakir” dengan awalan ke dan akhiran an. Dua kata tersebut seringkali juga disebutkan secara bergandengan, yakni kata “fakir miskin” dengan pengertian orang yang sangat kekurangan.⁶² Al-Qur’an memakai beberapa kata dalam

⁶⁰ Nani Machendrawaty, hlm. 28.

⁶¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik

⁶² Menurut kamus bahasa Indonesia, dua kata “fakir” dan “miskin” sebenarnya mempunyai arti yang berbeda, fakir mempunyai dua pengertian, yaitu: 1) orang yang sangat kekurangan, orang yang terlalu miskin; 2) orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Sedangkan miskin juga mempunyai pengertian, yaitu tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan rendah. Lihat Lukman Ali, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 273 & 660

menggambarkan kemiskinan, yaitu faqir, miskin, al-sail, dan almahrum, tetapi dua kata yang pertama paling banyak disebutkan dalam ayat al-Qur'an. Kata fakir dijumpa dalam al-Qur'an sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 25 kali.⁶³

Menurut Qardhawi, tidak satu pun ayat Al-Qur'an yang memuji kemiskinan dan tak sebaris pun hadits sahih Rasulullah SAW yang memujanya. Hadits-hadits yang memuji sikap zuhud di dunia bukan berarti memuji kemiskinan. Zuhud berarti memiliki sesuatu dan menggunakannya secara sederhana. Orang zahid adalah mereka yang memiliki dunia tetapi meletakkannya di tangan, bukan di dalam hatinya⁶⁴

e. Penguatan Ekonomi Masyarakat

Penguatan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk menciptakan perekonomian yang tangguh, maju, modern, dan mampu bersaing dalam mekanisme pasar yang adil. Mengingat hambatan dalam pengembangan ekonomi masyarakat bersifat struktural, pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan melalui perubahan struktur. Perubahan ini melibatkan transformasi dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang kuat, dari sistem subsisten ke ekonomi berbasis

⁶³A. Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 31.

⁶⁴A. Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* hlm. 22

pasar, serta dari ketergantungan menuju kemandirian.⁶⁵ Proses perubahan struktural ini meliputi langkah-langkah berikut.⁶⁶

- 1) Mengalokasikan sumber daya untuk pemberdayaan.
- 2) Memperkuat kelembagaan.
- 3) Menguasai teknologi.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penguatan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama, atau menyuntikkan modal sebagai stimulan. Penting juga untuk memastikan adanya kerja sama dan kemitraan erat antara pelaku usaha yang sudah maju dengan mereka yang masih lemah atau belum berkembang. Kebijakan dalam penguatan ekonomi masyarakat meliputi:⁶⁷

- 1) Memberikan akses lebih besar terhadap aset produksi, terutama modal.
- 2) Memperkuat posisi negosiasi dan kemitraan usaha masyarakat agar tidak hanya menjadi penerima harga (*price taker*).
- 3) Memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan.
- 4) Memperkuat industri kecil.
- 5) Mendorong munculnya wirausahawan baru.
- 6) Mencapai pemerataan ekonomi di berbagai wilayah (*spasial equity*).

⁶⁵ Arief Mufti and Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa Ekonomi Berbasis Syariah*, 2nd edn (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2014), hlm. 58.

⁶⁶ Arief Mufti and Syakir Sula, hlm. 59.

⁶⁷ Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis, Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* (Indeks, 2009), hlm. 65.

Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip berikut harus diterapkan untuk memastikan keberhasilan program penguatan ekonomi masyarakat:⁶⁸

1) Prinsip Kesetaraan

Program pemberdayaan harus melibatkan semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan gender. Setiap individu didorong untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi, sehingga tercipta dinamika yang mendukung pembelajaran bersama, saling membantu, dan mendukung. Adapun ayat yang berbicara tentang kesetaraan terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ۙ ۱۳

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁶⁹

2) Prinsip Partisipasi

Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam merancang, mengorganisasi, dan menjalankan program akan

⁶⁸ Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis, Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, hlm. 66.

⁶⁹ Departemen Agama RI.

mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan program tersebut.

3) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Pendekatan ini menitikberatkan pada kemampuan masyarakat sendiri daripada mengandalkan bantuan luar. Masyarakat dilihat sebagai individu dengan potensi dan kapasitas yang belum sepenuhnya terekplorasi, bukan hanya sebagai penerima bantuan. Dukungan dari luar hanya bertujuan membantu masyarakat mencapai kemandirian. Ayat yang berbicara tentang keswadayaan yaitu berbunyi pada ayat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷⁰

⁷⁰ Departemen Agama RI.

4) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang agar dapat terus berjalan tanpa ketergantungan pada fasilitator. Peran pendamping awalnya mungkin dominan, tetapi secara bertahap masyarakat harus mampu mengelola program secara mandiri. Keberhasilan pemberdayaan terlihat dari kemampuan program untuk bertahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa depan, sehingga dampaknya dirasakan tidak hanya oleh individu tetapi juga oleh komunitas secara luas.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik yang sama yaitu:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bariyyatin Nafi'ah dalam jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 7, No. 2 tahun 2021.	Analisis Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016- 2019).	Variabel ZIS memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan sedangkan IPM dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan Kemiskinan. Berdasarkan pada hasil regresi dengan menggunakan random effect mode yang terlihat pada tabel, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,679005 memiliki arti bahwa ZIS, IPM dan Inflasi berpengaruh

			terhadap tingkat kemiskinan sebesar 67,9 %. Sedangkan sisanya 30,3 % dipengaruhi oleh hal yang lain yang tidak di analisis pada penelitian ini. ⁷¹
2.	Tuti Alawiyah dan Farhan Setiawan dalam jurnal Sosiologi USK vol, 15, no. 2 tahun 2021.	Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa	Faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut: kondisi wilayah, pertumbuhan ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, ketimpangan, rasa ketergantungan, dan kenyamanan dalam zona. Pengentasan kemiskinan melalui kearifan lokal dapat dilakukan dengan menggali sumber daya alam dan potensi diri yang ada pada masyarakat pedesaan. Kemudian pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam proses penanggulangan kemiskinan membutuhkan empat prinsip: kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. ⁷²
4	Inka Nusamuda Pratama dalam Jurnal Komunikasi dan	Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif <i>Collaborative Governance</i> di Kota	Skema pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif <i>Collaborative Governance</i> di Kota

⁷¹ Bariyyatin Nafi'ah, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), hlm. 1.

⁷² Tuti Alawiyah and Farhan Setiawan, 'Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa', *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15.2 (2021), hlm. 131-154.

	Kebudayaan Vol. 10 No. 1 (2023).	Mataram	Mataram berjalan dengan baik. Kerjasama kolektif antara Pemerintah dan Swasta mampu menekan angka pengentasan kemiskinan di Kota Mataram. Kolaborasi dibutuhkan untuk terus mendorong lahirnya inovasi-inovasi dibidang pengetahuan, formulasi kebijakan yang ideal dan tepat sasaran, support bantuan dan sumbangan berbentuk logistik, serta mutual understanding dari masyarakat yang mampu memberikan dampak positif dalam menekan pengentasan kemiskinan di Kota Mataram. ⁷³
5	Hendy Setiawan dan Choirunnisa dalam Jurnal Lamahu No. Vol 2, No 1; February 2023.	Penyuluhan Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Masyarakat di Desa Simpar Kabupaten Batang	Masyarakat Desa Simpar memiliki sikap partisipatif dalam kegiatan penyuluhan terkait strategi pengentasan kemiskinan. Diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung dengan baik, menunjukkan antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam memahami materi yang disampaikan. Penyuluhan ini menggunakan pendekatan partisipatif, melibatkan perangkat desa, tokoh

⁷³ Inka Nusamuda Pratama, 'Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram', *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10.1 (2023), phlm. 61-77 (hlm. 61), doi:10.59050/jkk.v10i1.221.

			masyarakat, lembaga desa, serta anggota masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat semakin menyadari pentingnya kekuatan lokal dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Diharapkan, pemahaman yang diperoleh dapat diaplikasikan oleh seluruh komponen masyarakat Desa Simpar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dengan memanfaatkan potensi komunitas setempat. ⁷⁴
6	Rafi Aufa Mawardi dan Muhammad Rizki Pratama dalam Jurnal Studi Inovasi Vol 3 No 1 (2023).	Peran <i>Social Enterprise</i> Sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.	<i>Social enterprise</i> hadir sebagai pihak eksternal yang berperan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini terlihat dari beberapa peran fungsionalnya, seperti melakukan pemberdayaan masyarakat, memberikan layanan jasa keuangan mikro, dan menyediakan pendidikan gratis. ⁷⁵
7	Farros Althof Swandriano dan Muhammad Arif	Efektivitas Program Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan	Variabel Dana Desa (DD) dan Program Indonesia Pintar (PIP) berpengaruh

⁷⁴ Hendy Setiawan and Choirunnisa Choirunnisa, 'Penyuluhan Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Masyarakat di Desa Simpar Kabupaten Batang', *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 2.1 (2023), phlm. 16–23 (hlm. 16), doi:10.34312/ljpmt.v2i1.17638.

⁷⁵ Rafi Aufa Mawardi and Muhammad Rizki Pratama, 'Peran Social Enterprise Sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Studi Inovasi*, 3.1 (2023), hlm. 1, doi:10.52000/jsi.v3i1.130.

	dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 9, No 1 (2023).	di Kabupaten Kudus	signifikan terhadap kemiskinan di beberapa kecamatan kabupaten Kudus antara tahun 2018 dan 2021, sedangkan variabel Program Keluarga Harapan (PKH) tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan di sejumlah kecamatan kabupaten Kudus antara tahun 2018 hingga 2021. ⁷⁶
8	Primadiana Yunita, Ibnu Asqori Pohan dan Wifka Rahma Syauki dalam Jurnal Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol. 8 No. 2 (2023).	Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Jokowi	Penelitian ini menemukan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang melalui pendekatan collaborative governance masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu temuan utama adalah ketiadaan ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur kolaborasi dalam pengurangan kemiskinan, sehingga kerangka kelembagaan untuk mendukung sinergi lintas pihak belum jelas. Meskipun aspek strategis pengentasan kemiskinan telah tercantum dalam Misi ke-5 Kabupaten Malang dan RPJMD 2016-2021, implementasinya belum sepenuhnya efektif

⁷⁶ Farros Althof Swandriano and Muhammad Arif, 'Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus', *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9.1 (2023), hlm. 71 (hlm. 71), doi:10.35906/jehlm.v9i1.1401.

			<p>karena kurangnya mekanisme kolaborasi yang terstruktur. Dari sisi hubungan kelembagaan, pola interaksi dan konektivitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya terjalin secara horizontal, tanpa adanya hubungan vertikal atau lintas sektor yang lebih luas untuk memperkuat upaya bersama. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada koalisi advokasi yang secara khusus dirancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang, yang mencerminkan kurangnya sinergi antara berbagai pihak yang seharusnya terlibat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, hubungan kelembagaan yang lebih baik, serta pembentukan koalisi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.⁷⁷</p>
9	Novi Dianita Sari, Nurvita	Strategi Kebijakan Publik Melalui Program	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁷⁷ Primadiana Yunita, Ibnu Asqori Pohan, and Wifka Rahma Syauki, 'Kinerja Kelembagaan, Relasi Struktural, Dan Koalisi Advokasi Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Malang', *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8.2 (2023), phlm. 216–31 (hlm. 216), doi:10.36636/dialektika.v8i2.2993.

	Diah Rahayu, Binti Saniatu Salimah, Nur Muhammad Hima Firmansah dan Novi Khoiriawati dalam <i>Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)</i> , Vol. 3 No. 2 (2024): Juni.	Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Jokowi	strategi kebijakan publik yang diterapkan pada masa kepemimpinan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla dan Ma'ruf Amin telah efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, beberapa program utama yang berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan meliputi Program Tabungan Keluarga Sejahtera (SKS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat. Program-program ini berfokus pada pemberdayaan keluarga, peningkatan akses pendidikan, serta layanan kesehatan yang merata. ⁷⁸
10	Tundiles Kogoya, Ventje Kasenda dan Fanley N Pangemanan dalam <i>Jurnal PALEMBANG</i>	Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua	Kepentingan kelompok sasaran implementasinya belum baik. Dalam Program pelayanan kesehatan bagi Orang miskin dengan cara mengajak partisipasi aktif dari masyarakat distrik nunggawi untuk mendukung program pelayanan ini yang telah berjalan meskipun masih mandek-mandek. Derajat

⁷⁸ Novi Dianita Sari and others, 'Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan Di Era Pemerintahan Jokowi', *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3.2 (2024), phlm. 14–25 (hlm. 14), doi:10.58192/ebismen.v3i2.2112.

		<p>perubahan yang diinginkan yaitu kemampuan dari Pemerintah distrik dan pemerintah desa harus meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan di berbagai departemen, lalu Pemberian bantuan modal dan pelatihan usaha kecil menengah (UKM). Implementasi kebijakan pemerintah daerah pendidikan bagi anak-anak yang ada di distrik nunggawi, membiayai biaya studi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Seperti dibebaskannya biaya sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) serta dibebaskan biaya-biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). lalu Program perbaikan rumah layak diuni. Karena saat ini warga masih pake rumah honai di distrik nunggawi.⁷⁹</p>
--	--	---

Adapun beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

⁷⁹ Tundiles Kogoya, Ventje Kasenda, and Fanley N Pangemanan, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua', 3.1 (2023), hlm. 1.

1. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Bariyyatin Nafi'ah yaitu sama-sama membahas pengentasan kemiskinan di Indonesia dan menggunakan data sekunder sebagai salah satu sumber data penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Bariyyatin menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
2. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Tuti Alawiyah & Farhan Setiawan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian dan sama-sama menekankan peran masyarakat dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Tuti Alawiyah berfokus pada kearifan lokal sebagai strategi pengentasan kemiskinan, sementara penelitian ini lebih menyoroti peran pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi dan subjek penelitiannya yaitu pada Masyarakat desa.
3. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Inka Nusamuda Pratama yaitu sama-sama membahas pengentasan kemiskinan dalam satu wilayah spesifik (kota) dan melibatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Inka Nusamuda berfokus pada kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pengentasan kemiskinan, sementara penelitian ini lebih banyak membahas program pemerintah daerah secara langsung dan dilakukan di Kota Padangdimpuan.

4. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Hendy Setiawan & Choirunnisa yaitu sama-sama menekankan peran masyarakat dalam strategi pengentasan kemiskinan dan menggunakan teknik wawancara dan observasi dalam pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian Hendy Setiawan lebih ke program penyuluhan dan pendekatan partisipatif masyarakat, sementara penelitian ini lebih menekankan peran pemerintah daerah dalam kebijakan ekonomi dan subjek penelitian pada masyarakat desa.
5. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Rafi Aufa Mawardi & Muhammad Rizki Pratama yaitu sama-sama membahas strategi inovatif dalam pengentasan kemiskinan dan menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian Rafi Aufa berfokus pada peran Social Enterprise sebagai pihak eksternal, sedangkan penelitian ini menekankan peran pemerintah daerah dan subjek penelitiannya adalah *social enterprise*.
6. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Farros Althof Swandriano & Muhammad Arif yaitu sama-sama mengkaji program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan menggunakan data sekunder dari kebijakan pemerintah. Sedangkan perbedaannya Penelitian Farros Althof menggunakan analisis kuantitatif terhadap efektivitas Dana Desa (DD) dan Program Indonesia Pintar (PIP), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap program penguatan ekonomi masyarakat dan lokasi di Kota Padangsidempuan.

7. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Primadiana Yunita *et al.* yaitu sama-sama membahas strategi kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan dan efektivitas program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya Penelitian Primadiana berfokus pada evaluasi kebijakan secara nasional di era Presiden Jokowi, sementara penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah Kota Padangsidempuan.
8. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Tundiles Kogoya *et al.* yaitu sama-sama membahas implementasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Tundiles Kogoya menyoroti program layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin di Papua, sedangkan penelitian ini lebih menekankan penguatan ekonomi masyarakat melalui peran pemerintah daerah.
9. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Novi Dianita Sari, Nurvita Diah Rahayu, Binti Saniatu Salimah, Nur Muhammad Hima Firmansah, dan Novi Khoiriawati yaitu sama-sama Membahas strategi kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan dan efektivitas program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian Novi menggunakan analisis kebijakan berbasis data makro dan mengkaji program seperti Program Tabungan Keluarga Sejahtera (SKS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat,

sedangkan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif berbasis wawancara dan observasi lapangan.

10. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Tundiles Kogoya, Ventje Kasenda, dan Fanley N Pangemanan yaitu sama-sama membahas implementasi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Tundiles Kogoya lebih menyoroti program layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin di Papua, sedangkan penelitian ini berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui peran pemerintah daerah Kota Padangsidempuan.

C. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Skema II.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Padangsidimpuan. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2025. Waktu pelaksanaan penelitian telah ditentukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan oleh peneliti.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Krik dan Miller menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia beragam manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan, dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.⁸⁰

C. Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau Desa. Dalam menganalisa banyaknya data satuan menunjukkan banyak subjek

⁸⁰ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV. Jejak, 2018), phlm. 7–8.

penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan sebenarnya.⁸¹ Adapun yang menjadi subjek di dalam penelitian ini adalah beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung di dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padangsidempuan yang mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, serta Lembaga Legislatif dan Organisasi kemasyarakatan:

1. Kepala Dinas Sosial Daerah Kota Padangsidempuan Zufri Nasution, S. Pd.
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Padangsidempuan Drs. Risman Kholik Harahap.
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan Gustomy H. Siregar, S.Sos, M.M
4. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kota Padangsidempuan Edi Darwan Harahap, SP
5. Ketua Komisi III DPRD Kota Padangsidempuan Periode 2018 – 2023 H. Khoiruddin Siagian, Lc, M. Ag.
6. Kepala Baznas Kota Padangsidempuan Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon.

Adapun subjek penelitian di atas dipilih peneliti karena mereka merupakan pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Rineka Cipta, 2016), hlm. 88.

5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan dan juga Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan

1. Kepala Dinas Sosial berperan dalam perumusan dan implementasi kebijakan bantuan sosial serta program kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas. Dinas Sosial mempunyai Fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan dan kebijakan bidang sosial;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan pusat dan propinsi serta melaksanakan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.
 - c. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansilain di bidang sosial/ skala daerah.
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.
 - e. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber daya manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas dari Dinas Sosial Kota Padangsidempuan adalah: melakukan jaminan sosial, melakukan pemberdayaan sosial, melakukan rehabilitasi sosial dan melakukan perlindungan sosial.

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan Kota di bidang tenaga kerja. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan kebijakan kebijakan bidang tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi serta pemerintahan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- c. Menyusun perencanaan bidang tenaga kerja.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang tenaga kerja skala Kota.
- e. Pelaksaaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- f. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber Daya Manusia aparatur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan

Kepala Dinas bertanggung jawab atas program pelatihan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat miskin.

3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - c. Pelaksanaan promosi dan pemasaran produk Daerah;
 - d. Perencanaan pembangunan industri di Daerah;
 - e. Pelaksanaan perizinan bidang perindustrian;
 - f. Pelaksanaan sistem informasi industri nasional;
 - g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Dinas Pertanian memiliki peran dalam pemberdayaan petani dan optimalisasi sektor pertanian sebagai salah satu sumber mata pencaharian. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, perikanan dan penyuluhan pertanian;

- a. Pengembangan prasarana pertanian;
 - b. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, perbibitan ternak, hijauan pakan ternak dan produksi perikanan;
 - c. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - d. Pembinaan produksi di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - e. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - f. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketua Komisi III DPRD sekaligus sebagai anggota Badan Anggaran memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan APBD serta memberikan persetujuan terkait anggaran pelaksanaan pembangunan
6. Ketua Baznas memiliki peran dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dapat membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrem.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Untuk penelitian data primer bersumber dari kepala dinas dan Baznas yang terkait dengan P3KE di Kota Padangsidimpuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder berperan membantu mengungkap data yang diharapkan, data sekunder diperoleh dari referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun data sekunder diperoleh dari catatan-catatan, dokumen, hasil penelitian ataupun buku yang diperoleh dari kepala dinas dan Baznas yang terkait dengan P3KE di Kota Padangsidempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi narasumber, seperti kepala dinas dan Baznas yang terkait dengan P3KE di Kota Padangsidempuan. Narasumber yang dipilih terdiri dari pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lokasi penelitian terkait pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁸² Peneliti mengadakan wawancara dengan

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Alfabeta, 2012), hlm. 194.

kepala dinas, anggota DPRD dan Baznas yang terkait dengan P3KE di Kota Padangsidempuan yang dianggap berkompeten dan *representatif* dengan masalah untuk memperoleh informasi mengenai pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan.

3. Teknik Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari data-data yang ada, yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini melalui buku, artikel, brosur, majalah, surat kabar, internet dan media lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan.⁸³ Dokumentasi yang dilakukan pada saat wawancara pertama adalah dengan menggunakan *smartphone* yang berbentuk rekaman suara pada saat wawancara. Wawancara yang kedua setelah seminar proposal adalah dengan menggunakan instrumen yang sama yaitu *smartphone* dalam mengambil rekaman suara ataupun foto.

4. Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD) adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan sekelompok kecil orang untuk berdiskusi mengenai suatu topik tertentu. Diskusi ini dipandu oleh seorang moderator yang bertugas mengarahkan pembicaraan agar tetap fokus pada tujuan penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan pekerjaan yang amat kritis dalam proses penelitian, penelitian harus secara cermat menentukan pola

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Alfabeta, 2012), hlm. 137.

analisis statistik ataupun non statistik.⁸⁴ Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif Deskriptif.

Tujuan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.⁸⁵ Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu pengolahan data mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengiktisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.
2. Penyajian data (*Display data*), Hasil reduksi data diorganisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.
3. *Conclution drawing and verification*, pembuatan tabel atau diagram berbentuk sketsa, sinopsis, matriks atau bentuk-bentuk lain ataupun jenis

⁸⁴ Pujani Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Kencana, 2012), hlm. 209.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 103.

reduksi data yang telah diorganisasikan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.⁸⁶

Adapun pengolahan data pada penelitian ini menggunakan *software* Nvivo 12 yaitu dengan tahapan dan teknik sebagai berikut:

1. *Word cloud*, yaitu melihat apa “kata” yang paling sering diucapkan oleh informan.
2. *Hierarchy Chart*, hal yang paling sering dibicarakan di dalam hasil wawancara.
3. *Mind Map*, yaitu kerangka berpikir yang terbentuk dalam hasil wawancara.
4. *Project Map*, yaitu hubungan antara *codes* atau *nodes* dengan pernyataan yang diutarakan oleh responden.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat dan kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁸⁷ Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembimbing terhadap data itu, adapun pengecekan data yang digunakan adalah:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan penelitian sangat menentukan dalam pengumpulan data, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi

⁸⁶ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Kencana, 2010), phlm. 7–8.

⁸⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 173.

memerlukan perpanjangan. Perpanjangan keikutsertaan adalah untuk memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, data juga untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan dari peneliti sendiri.

2. Ketentuan Pengamatan

Ketentuan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan daripada hal-hal tersebut secara rinci. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara tentatif dan penelaahan secara rinci dapat dilakukan.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.⁸⁸

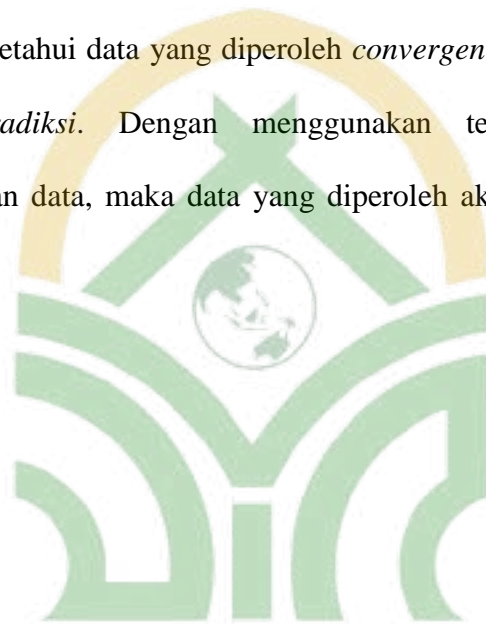
4. Mengadakan *Memberchek*

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *memberchek* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

5. Triangulasi

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*, hlm. 275.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁸⁹ Nilai dari teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau *kontradiksi*. Dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

⁸⁹ Sugiyono, hlm. 423.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu dari 8 (delapan) kota dengan luas wilayah 159,28 Km² atau setara dengan 0,2% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kota Padangsidempuan yang terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2001, awalnya terdiri dari 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan kelurahan. Namun seiring kebutuhan roda pemerintahan pada tahun 2005 Kota Padangsidempuan dimekarkan menjadi 6 (enam) kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 Kelurahan. Gambaran tentang wilayah administrasi dan luas wilayah Kota Padangsidempuan dirinci menurut kecamatan beserta jumlah desa dan kelurahan di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel IV.1 Jumlah Kelurahan/ Desa dan Luas Wilayah Kota Padangsidempuan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan			Luas Wilayah (Km ²)
		Kelurahan	Desa	Jumlah	
1	Padangsidempuan Tenggara	2	16	18	37,70
2	Padangsidempuan Selatan	12	-	12	19,26
3	Padangsidempuan Batunadua	2	13	15	41,81
4	Padangsidempuan Utara	16	-	16	14,97
5	Padangsidempuan Hutaimbaru	5	5	10	22,64
6	Padangsidempuan Angkola Julu	-	8	8	22,90
Jumlah		37	42	79	159,28

Sumber: Kota Padangsidempuan dalam Angka Tahun 2023

Kota Padangsidimpuan terletak sekitar 432 km dari Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, dan dikelilingi sepenuhnya oleh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara geografis, Kota Padangsidimpuan memiliki posisi yang cukup strategis dengan akses transportasi darat yang baik, karena berada di jalur utama yang menghubungkan berbagai pusat pertumbuhan di Pulau Sumatera. Kota ini terletak di bagian tengah dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara administratif, Kota Padangsidimpuan terdiri dari enam kecamatan, yaitu Padangsidimpuan Angkola Julu, Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Batunadua, Padangsidimpuan Utara, dan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Adapun batas-batas wilayahnya dapat dilihat sebagai berikut:⁹⁰

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat).
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola).
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Selatan).
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur).

Secara geografis, Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota sedang yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan berada pada posisi sebelah selatan Kota Sibolga. Kota sedang merupakan kota dengan jumlah

⁹⁰ <https://putr.padangsidimpuankota.go.id> diakses pada tanggal 29 April 2025 Pukul 15.00 WIB.

penduduk antara 100.000 sampai 500.000 orang. Kota Padangsidimpuan terletak di 432 Km dari Kota Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara, dengan wilayah yang dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan dan dapat ditempuh dalam waktu ± 10 jam melalui jalan darat. Posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera. Jarak tempuh Kota Padangsidimpuan via Sibolga menuju medan sejauh 470 Km², Jarak tempuh Kota Padangsidimpuan via Sipirok menuju medan sejauh 406 Km², dan Jarak tempuh Kota Padangsidimpuan via Gunung Tua menuju medan sejauh 507 Km².

Akses menuju Kota Padangsidimpuan dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni menggunakan pesawat terbang atau kendaraan darat dari Medan, Sumatera Utara, atau Padang, Sumatera Barat. Jika memilih jalur darat, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 11 hingga 12 jam, melewati jalanan berbukit yang cukup berbahaya saat musim hujan, khususnya di kawasan Aek Latong. Alternatif lainnya adalah melalui udara, dengan tiga jadwal penerbangan harian dari Bandara Polonia menuju Bandara Aek Godang, yang memakan waktu sekitar 55 menit dan menawarkan pemandangan Danau Toba dari ketinggian. Setibanya di

Bandara Aek Godang, perjalanan dilanjutkan menggunakan mobil selama kurang lebih 40 menit menuju Kota Padangsidempuan.⁹¹

Secara astronomis Kota Padangsidempuan terletak pada posisi 01° 18' 07'' – 01° 28' 19'' Lintang Utara dan 99° 18' 53'' – 99° 20' 35'' Bujur Timur dan terletak antara 260-1100 meter di atas permukaan laut (DPL). Sehingga titik koordinat terendah meter di atas permukaan laut (MDPL) berada di 260 meter dan titik koordinat tertinggi wilayah Kota Padangsidempuan berada 1100 meter di atas permukaan laut (MDPL).

2. Sejarah Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai “Kota Salak” karena banyaknya kebun salak, khususnya di daerah kaki Gunung Lubukraya. Nama Padang Sidempuan berasal dari istilah “Padang na Dimpu,” yang berarti “hamparan luas di tempat yang tinggi.” Dahulu, kawasan ini menjadi persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, seperti pedagang ikan dan garam dari rute Sibolga-Padangsidempuan-Panyabungan serta Padang Bolak (Paluta)-Padangsidempuan-Sibolga.⁹²

Seiring waktu, tempat persinggahan ini berkembang menjadi kota. Pembangunan Kota Padangsidempuan bermula pada tahun 1821 dengan didirikannya sebuah benteng oleh pasukan Paderi di bawah pimpinan Tuanku Imam Lelo. Benteng tersebut membentang dari Batang Ayumi

⁹¹ <https://putr.padangsidempuankota.go.id> diakses pada tanggal 29 April 2025 Pukul 15.00 WIB.

⁹² <https://putr.padangsidempuankota.go.id> diakses pada tanggal 29 April 2025 Pukul 15.00 WIB.

hingga Aek Sibontar, dan hingga kini, sisa-sisanya masih dapat ditemukan meskipun dalam kondisi kurang terawat. Kehadiran pasukan Paderi turut membawa pengaruh terhadap penyebaran agama Islam, yang kini menjadi agama mayoritas penduduk kota ini.⁹³

Pada masa kolonial Belanda, Padangsidempuan dijadikan pusat pemerintahan untuk wilayah Tapanuli. Beberapa bangunan peninggalan Belanda, seperti kantor pos dan kantor polisi, masih berdiri di pusat kota. Dokumentasi sejarah Kota Padangsidempuan, termasuk foto-foto masa lalu, bahkan tersimpan di museum di Leiden, Belanda. Sebelumnya, Padangsidempuan berstatus sebagai Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001, pada tanggal 21 Juni 2001 Padangsidempuan resmi menjadi daerah otonom, hasil penggabungan enam kecamatan: Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan Selatan, Padangsidempuan Batunadua, Padangsidempuan Hutaimbaru, Padangsidempuan Tenggara dan Padangsidempuan Angkola Julu, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan.⁹⁴

Pada dasarnya, penduduk merupakan aspek penting dalam proses pembangunan daerah dimana penduduk berperan sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Namun, ketika pertumbuhan penduduk yang terus bertambah tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas penduduk dan sarana

⁹³ <https://putr.padangsidimpunkota.go.id> diakses pada tanggal 29 April 2025 Pukul 15.00 WIB.

⁹⁴ <https://putr.padangsidimpunkota.go.id> diakses pada tanggal 29 April 2025 Pukul 15.00 WIB.

prasarana yang memadai justru akan menimbulkan permasalahan bagi kehidupan masyarakat. Tantangan yang dapat timbul akibat meningkatnya jumlah penduduk antara lain adalah kebutuhan lapangan pekerjaan yang akan berdampak pada perekonomian daerah. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan diharapkan mampu meningkatkan sektor-sektor unggulan daerah dan meningkatkan daya saing daerah untuk membuka lapangan pekerjaan secara luas dengan diimbangi penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik. Melalui penyediaan fasilitas dan peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan serta pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang dapat membantu dalam pencapaian Indonesia emas pada tahun 2045.

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Padangsidempuan Tahun 2022-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk per km ²		Rasio Jenis Kelamin	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Padangsidempuan Tenggara	34.713	35.447	921	940	99,04	102,00
Padangsidempuan Selatan	70.342	71.766	3.652	3.726	99,18	101,83
Padangsidempuan Batunadua	30.037	30.976	718	741	99,70	102,02
Padangsidempuan Utara	66.831	68.067	4.464	5.547	98,33	101,27
Padangsidempuan Hutaimbaru	19.443	19.976	859	882	99,91	102,68
Padangsidempuan Angkola Julu	9.696	9.985	423	436	101,79	104,74
Kota Padangsidempuan	231.062	236.217	1.451	1.483	99,15	101,91

Sumber: Kota Padangsidempuan dalam Angka Tahun 2023

Pada tabel IV.2 Jumlah penduduk di Kota Padangsidempuan pada tahun 2023 berjumlah 236.217 jiwa mengalami kenaikan jumlah penduduk

sebesar 5.155 jiwa bila dibandingkan pada tahun 2022 berjumlah 231.062. seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kepadatan penduduk mengalami kenaikan dari angka 1.451 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2022 menjadi 1,483 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2023. Kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2022 dan tahun 2023 berada di Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Padangsidempuan Selatan dengan capaian pada tahun 2022 masing masing sebesar 4.464 jiwa/Km² dan 3.652 jiwa/Km² dan pada tahun 2023 masing masing sebesar 4.547 jiwa/Km² dan 3.276 jiwa/Km². Pada tahun 2023, rasio jenis kelamin di Kota Padangsidempuan sebesar 101,91 yang artinya terdapat 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki di Kota Padangsidempuan lebih banyak dari penduduk perempuan namun dengan selisih yang tidak terlalu signifikan. Implikasi yang timbul akibat rasio jenis kelamin yang cukup seimbang adalah kesempatan bagi kaum perempuan dalam partisipasi pembangunan.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2022-2023

Penduduk Menurut Kelompok Umur	2022	2023
0-14	26,90	63.031
15-64	67,81	160.381
>65	5,28	12.805

Sumber: Kota Padangsidempuan dalam Angka Tahun 2023

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64) pada tahun 2023 berjumlah 160.381 jiwa (67,90%) dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun) dan 65 tahun ke atas) sejumlah 75.836 jiwa (32,10%). Penduduk di

Kota Padangsidempuan sebagian besar dihuni oleh penduduk berusia 0-4 tahun. Jika mengacu pada klasifikasi generasi menurut Badan Pusat Statistik yang terdiri dari Generasi *Baby Boomers* (Kelahiran 1946-1964), Generasi X (Kelahiran 1965-1980), Generasi Y atau *Millennials* (Kelahiran 1981-1996) dan generasi Z (Kelahiran 1997-2012) dan generasi *Alpha* (Kelahiran 2013-2025) ditemukan bahwa generasi di Kota Padangsidempuan didominasi oleh Generasi Y atau *Millennials*, Gen Z dan Gen *Alpha*. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya perluasan lapangan pekerjaan untuk mengimbangi penduduk usia produktif yang tinggi. Kondisi ini merupakan peluang bagi Kota Padangsidempuan untuk memanfaatkan penduduk usia produktif untuk mengakselerasi pembangunan Kota Padangsidempuan.⁹⁵

Dalam percepatan pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Padangsidempuan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota Padangsidempuan serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten / kota. TKPK dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

⁹⁵ [BPS Kota Padangsidempuan dalam Angka Tahun 2024.](#)

- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi Kota Padangsidempuan;
- b. Koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padangsidempuan di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Padangsidempuan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok pengelola program penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

- a. Kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu; dan
- b. Kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

3. Kemiskinan di Kota Padangsidempuan

Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan yang digunakan sebagai batas untuk mengklasifikasikan sebagai miskin atau tidak. Jika pengeluaran seseorang dibawah garis kemiskinan, maka orang tersebut dianggap miskin. Adapun karakteristik data kemiskinan

di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2021-2023 dapat dilihat dalam tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.4 Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan

Tahun	Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase
2021	17,28	7,53
2022	16,03	6,89
2023	16,15	6,85

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Satgas P3KE Kemenko PMK tahun 2023/2024

Tabel IV.4 memperlihatkan bahwa garis kemiskinan di Kota Padangsidimpuan mengalami tren kenaikan dari tahun 2021 hingga 2023, yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan minimum hidup layak setiap tahunnya. Tingginya persentase penduduk miskin pada tahun 2021 disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta tekanan inflasi. Penurunan angka kemiskinan yang cukup tajam pada tahun 2022 menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan atau keberhasilan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Sementara itu, meskipun jumlah penduduk miskin kembali meningkat pada 2023, persentasenya justru sedikit menurun, yang menandakan bahwa laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan lebih cepat dibandingkan penambahan jumlah penduduk miskin.

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2021-2023

Wilayah	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem						Target 2024
	2021		2022		2023*		
Padangsidimpuan	1,60	3,668	0,19	442	0,39	930	0
Sumatera Utara	1,39	208,061	1,41	212,808	0,78	118,420	0

Nasional	2,1 4	5,800,04 0	2,0 4	5,590,72 0	1,1 2	3,340,00 0	0
----------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	---

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Satgas P3KE Kemenko PMK tahun 2023/2024

Tabel IV.5 menampilkan data persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dan secara nasional dari tahun 2021 hingga 2023, serta sasaran penghapusan total pada tahun 2024. Di Kota Padangsidempuan, angka kemiskinan ekstrem menunjukkan penurunan dari 1,60 persen atau 3.668 jiwa pada tahun 2021 menjadi 0,19 persen atau 442 jiwa pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 0,39 persen atau 930 jiwa. Sementara itu, di wilayah Sumatera Utara, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 208.061 jiwa pada 2021 menjadi 118.420 jiwa pada 2023. Secara nasional pun tren penurunan terlihat, dari 5.800.040 jiwa pada 2021 menjadi 3.340.000 jiwa pada 2023. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh hingga mencapai nol persen pada tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia.

B. Hasil Penelitian

1. Penyebab Kenaikan Kemiskinan Ekstrem di Padangsidempuan Tahun 2022 -2023

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat hidup jauh di bawah garis kemiskinan, dengan pengeluaran atau pendapatan yang sangat minim sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, akses pendidikan,

dan layanan kesehatan. Sehingga peneliti berusaha menganalisis apa saja penyebab kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, dinyatakan bahwa:

“Salah satu faktor utama penyebab meningkatnya kemiskinan ekstrem adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan program. Banyak tenaga sosial yang belum memiliki kompetensi yang memadai, sehingga proses verifikasi dan validasi data kurang optimal dan berisiko menimbulkan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial.”⁹⁶

Peneliti juga menanyakan mengenai permasalahan masyarakat dalam menghadapi kemiskinan ekstrem. Beliau menyampaikan bahwa:

“Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial juga menjadi tantangan serius. Banyak keluarga miskin ekstrem enggan berusaha mandiri karena merasa cukup dengan bantuan yang diterima. Selain itu, masih ada masyarakat yang tidak bersedia keluar dari data penerima bantuan (*graduasi*), meskipun sudah tidak layak, serta lemahnya peran desa dan kelurahan dalam mendukung pendataan yang akurat.”⁹⁷

Peneliti juga mewawancarai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan, yang menyatakan bahwa:

“Lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja, terutama dari kelompok miskin ekstrem. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,57% pada tahun 2023, dengan 8.549 jiwa menganggur. Rendahnya pendidikan dan keterampilan menjadi penghambat utama bagi kelompok ini untuk memperoleh pekerjaan atau memulai usaha mandiri.”⁹⁸

Peneliti menanyakan tentang pelatihan yang diprogramkan pemerintah bagi kelompok miskin ekstrem, dijelaskan bahwa:

⁹⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 29 April Pukul 09.30 WIB.

⁹⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 29 April Pukul 09.30 WIB.

⁹⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 23 April Pukul 10.00 WIB.

“Pelatihan keterampilan memang sudah diberikan, namun masih belum mampu menjangkau semua kelompok miskin ekstrem. Keterbatasan anggaran, akses informasi, dan kemampuan dasar peserta menjadi kendala dalam efektivitas pelatihan.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diperoleh informasi bahwa:

“Masyarakat miskin ekstrem sulit mengakses modal usaha dan seringkali tidak memiliki legalitas usaha. Walaupun berbagai pelatihan telah diberikan dan pemasaran produk dibantu melalui kegiatan seperti Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan *digital marketing*, keterbatasan finansial dan literasi digital menjadi hambatan besar dalam pemberdayaan ekonomi mereka.”¹⁰⁰

Peneliti juga menanyakan kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan, yang menyampaikan bahwa:

“Sebagian besar masyarakat miskin ekstrem bekerja sebagai buruh tani atau petani penggarap, bukan pemilik lahan, sehingga mereka tidak terdaftar dalam kelompok tani dan tidak bisa menerima bantuan pertanian seperti pupuk dan bibit. Akibatnya, potensi peningkatan produktivitas pertanian tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok ini.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan, disampaikan bahwa:

“Keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, dan koordinasi antar lembaga yang lemah menjadi faktor penghambat utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu, belum ada regulasi khusus seperti Perda yang mengatur secara detail pengentasan kemiskinan ekstrem, yang membuat upaya penanganan kurang terfokus dan berkelanjutan.”¹⁰²

⁹⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 23 April Pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 24 April Pukul 08.30 WIB.

¹⁰¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 24 April Pukul 08.30 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 22 April Pukul 09.00 WIB.

Peneliti juga mewawancarai Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, yang menyatakan bahwa:

“Bantuan yang diberikan BAZNAS masih bersifat konsumtif dan terbatas karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat serta belum adanya peraturan daerah yang mendukung pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran membuat program pemberdayaan ekonomi sulit dilakukan secara luas.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa Kenaikan angka kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan tahun 2022–2023 disebabkan oleh sejumlah faktor struktural dan operasional, seperti meningkatnya pengangguran, rendahnya akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga sosial yang kompeten, lemahnya motivasi masyarakat miskin untuk mandiri, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, rendahnya kepemilikan lahan pertanian, serta belum optimalnya sinergi antar instansi pemerintah dan swasta. Regulasi dan kebijakan yang belum mendukung secara menyeluruh juga memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah ini.

2. Strategi Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Diterapkan di Kota Padangsidempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Strategi penguatan ekonomi adalah serangkaian upaya terencana dan berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing ekonomi masyarakat maupun negara secara menyeluruh.

¹⁰³ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan pada Tanggal 21 April Pukul 14.00 WIB.

Strategi ini mencakup pengembangan sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan industri kreatif, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur. Penguatan ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui:¹⁰⁴

- a. Peningkatan pendapatan/ akses pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/ kelompok, seperti program Padat Karya Tunai / PKT (desa dan sector);
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi;
- c. Peningkatan kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan seperti program pendampingan usaha; dan
- d. Peningkatan akses pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap Lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, disampaikan bahwa:

“Strategi penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pemberian bantuan sosial bersifat dasar seperti sembako, PKH, dan JKN, serta bantuan ekonomi produktif seperti modal usaha dan alat kerja melalui program Usaha Ekonomi Perorangan (UEP) dan Pejuang Ekonomi Nasional (PENA). Strategi ini disesuaikan dengan

¹⁰⁴ Kepmenko PMK Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedum PPKE

kebutuhan masing-masing penerima manfaat, apakah untuk pemenuhan dasar atau peningkatan pendapatan.”¹⁰⁵

Peneliti juga mewawancarai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Padangsidimpuan, yang menyatakan bahwa:

“Strategi utama adalah peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, terutama bagi masyarakat usia produktif yang tidak sedang bersekolah. Pada tahun 2023, telah dilakukan pelatihan dalam berbagai bidang seperti menjahit, tata boga, tata rias, elektronik, dan lainnya. Tujuannya adalah membentuk tenaga kerja terampil dan mandiri, sekaligus membuka peluang usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin ekstrem.”¹⁰⁶

Beliau juga menyampaikan bahwa:

“Program SIAP KERJA menjadi media informasi lowongan kerja dan peluang magang yang menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja. Disnaker juga menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas akses lapangan kerja dan mendukung program pelatihan berbasis industri.”¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan, diperoleh bahwa:

“Strategi penguatan ekonomi masyarakat miskin ekstrem dilakukan dengan pemberdayaan UMKM, pelatihan manajemen usaha, pengemasan produk, pemasaran digital, dan fasilitasi akses legalitas seperti NIB, SP-PIRT, sertifikasi halal, dan BPOM. Disperindag juga mendukung pemasaran produk UMKM melalui partisipasi di ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) serta pelatihan keterampilan berbasis “*life skill*” seperti kerajinan tali kur.”¹⁰⁸

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 29 April Pukul 09.30 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 23 April Pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 23 April Pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 24 April Pukul 08.30 WIB.

Peneliti juga menanyakan mengenai akses modal, dan beliau menyatakan bahwa:

Pemerintah kota memberikan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta melakukan pendampingan intensif agar UMKM bisa naik kelas dan lebih kompetitif di pasar yang lebih luas.¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan, dijelaskan bahwa:

“Strategi yang diterapkan adalah melalui Program *on Farm* Petani Mandiri, penyaluran bantuan bibit dan pupuk, serta pelatihan penggunaan sarana pertanian. Petani juga diberdayakan melalui Program Genta Organik dan Sekolah Lapang Tematik untuk mengembangkan pertanian organik serta diversifikasi tanaman. Pemerintah juga memfasilitasi akses ke pasar melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan pangan agar petani memperoleh harga yang layak.”¹¹⁰

Peneliti juga mewawancarai Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan, yang menyatakan bahwa:

“BAZNAS menerapkan strategi pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran modal usaha kecil kepada keluarga miskin ekstrem. Mereka juga menyediakan pelatihan keterampilan praktis seperti menjahit, memasak, dan perbengkelan, bekerja sama dengan lembaga pelatihan. Namun, keterbatasan dana dan regulasi zakat menjadi kendala dalam perluasan skala program ini.”¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kota

Padangsidimpuan, beliau menegaskan bahwa:

“Penguatan ekonomi masyarakat miskin ekstrem harus didukung melalui regulasi yang berpihak, alokasi anggaran yang memadai, dan pembentukan program kolaboratif lintas OPD dan swasta. DPRD

¹⁰⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 24 April Pukul 08.30 WIB.

¹¹⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 24 April Pukul 08.30 WIB.

¹¹¹ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 21 April Pukul 14.00 WIB.

berperan dalam mendorong kebijakan dan pengawasan anggaran agar strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dijalankan secara berkelanjutan.”¹¹²

Kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui strategi dan program. Program pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi¹¹³. Strategi penguatan ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan dilakukan melalui pendekatan multi-sektor, melibatkan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pemberdayaan UMKM dan petani, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial. Program-program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin ekstrem agar dapat mandiri secara ekonomi. Tetapi upaya ini masih menghadapi tantangan dalam hal akses, keterbatasan dana, serta perlunya sinergi dan regulasi yang lebih kuat.

3. Solusi yang Tepat Bagi Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem P3KE di Kota Padangsidempuan

Solusi kemiskinan adalah berbagai upaya terintegrasi yang dirancang untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan secara menyeluruh dan

¹¹² Wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kota Padangsidempuan pada Tanggal 22 April Pukul 09.00 WIB.

¹¹³ Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan SDM TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.

berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun struktural. Solusi ini mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang layak dan inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, disampaikan bahwa:

“Solusi utama adalah peningkatan akurasi data kemiskinan ekstrem melalui verifikasi dan validasi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan P3KE, yang dilengkapi dengan musyawarah desa, foto kondisi rumah, dan data dukung lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dan pemberdayaan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.”¹¹⁴

Beliau juga menekankan bahwa:

“Perlu adanya kolaborasi yang lebih kuat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghindari ego sektoral dan meningkatkan sinergi pelaksanaan program. Selain itu, penguatan peran perangkat desa dan kelurahan dalam mendata dan mengedukasi masyarakat untuk keluar secara sukarela dari status penerima bantuan (*graduasi*) juga sangat penting.”¹¹⁵

Peneliti juga mewawancarai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Padangsidimpuan, yang menyatakan bahwa:

“Solusi penting adalah penguatan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi masyarakat miskin ekstrem yang tidak sekolah dan tidak bekerja. Disnaker menyarankan integrasi program pelatihan dengan P3KE agar hasil pelatihan lebih terarah pada kelompok target.”¹¹⁶

Ia juga menambahkan bahwa:

¹¹⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 29 April Pukul 09.30 WIB.

¹¹⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 29 April Pukul 09.30 WIB.

¹¹⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 23 April Pukul 10.00 WIB.

“Pendekatan digital melalui SIAPKERJA serta kerja sama dengan sektor swasta harus diperluas. Pemerintah juga perlu memperkuat akses informasi dan pendampingan, karena banyak masyarakat miskin ekstrem tidak mengetahui adanya pelatihan gratis dan peluang kerja.”¹¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan, dijelaskan bahwa:

“Solusi efektif adalah dengan mengintegrasikan UMKM miskin ekstrem ke pasar lebih luas melalui pelatihan digital marketing, sertifikasi halal, dan legalitas usaha. Dinas Kop, UKM, perindag juga menekankan pentingnya penguatan akses modal usaha melalui KUR dan program pembiayaan lainnya yang ramah bagi pelaku usaha mikro.”¹¹⁸

Peneliti juga mewawancarai Ketua Komisi III DPRD Kota

Padangsidimpuan, yang menyampaikan bahwa:

“Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus (Perda) tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem agar ada dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan dan evaluasi program. DPRD juga mendorong alokasi anggaran yang memadai, peningkatan edukasi masyarakat, serta pemantauan ketat terhadap efektivitas bantuan sosial dan pemberdayaan.”¹¹⁹

Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan

menyebutkan bahwa:

“Solusi utama dari perspektif BAZNAS adalah memperluas basis dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui penguatan regulasi (Perda/Perwal tentang ZIS) serta meningkatkan kesadaran ASN dan masyarakat umum untuk berzakat. Selain itu, penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif dinilai sangat

¹¹⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 23 April Pukul 10.00 WIB.

¹¹⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 24 April Pukul 08.30 WIB.

¹¹⁹ Wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 22 April Pukul 09.00 WIB.

strategis untuk membantu masyarakat miskin ekstrem menjadi mandiri.”¹²⁰

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Kepala Dinas terkait dalam penanganan kemiskinan ekstrem dapat diperoleh kesimpulan bahwa solusi yang tepat bagi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui program P3KE di Kota Padangsidimpuan mencakup berbagai pendekatan yang cukup strategis sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
10. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
11. Program Penyuluhan Pertanian.

Akurasi data penerima bantuan menjadi dasar penting agar program tepat sasaran. Melalui Data P3KE yang dapat digunakan sebagai data untuk mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan,

¹²⁰ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 21 April Pukul 14.00 WIB.

seperti bantuan modal usaha atau bantuan lainnya yang ditujukan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Sinergi lintas OPD dan keterlibatan aktif pemerintah desa memperkuat koordinasi pelaksanaan di lapangan. Peningkatan pelatihan kerja dan kewirausahaan memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat miskin ekstrem untuk lebih mandiri secara ekonomi. Dukungan akses terhadap modal dan pasar bagi pelaku UMKM turut memperluas peluang peningkatan pendapatan.

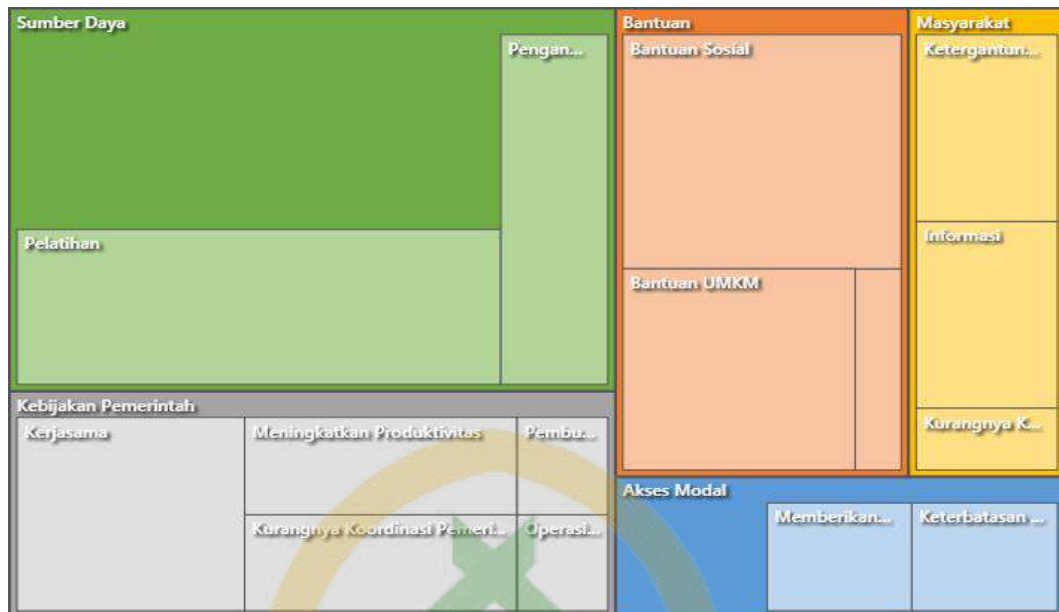
Selanjutnya keterlibatan sektor swasta perlu dioptimalkan sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Regulasi khusus serta alokasi anggaran yang konsisten juga menjadi faktor penentu keberlanjutan program. Optimalisasi potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui program ekonomi produktif berbasis keagamaan dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Sehingga efektivitas program P3KE diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan di Kota Padangsidimpuan.

C. Hasil Analisis Data Menggunakan Nvivo

1. Word Cloud

Berikut adalah hasil dari pengolahan data wawancara menggunakan Nvivo 12, yang menunjukkan sejumlah kata yang paling sering muncul dalam temuan tersebut:

Gambar IV.1 Word Cloud Hasil Penelitian



Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Nvivo12

Berdasarkan gambar IV.2 di atas maka dapat dijabarkan ke dalam 5 poin bahasan wawancara yaitu:

Pertama, aspek sumber daya menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Isu utama yang muncul adalah tingginya angka pengangguran yang menyebabkan banyak masyarakat tidak memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini diperparah dengan minimnya keterampilan masyarakat dalam mengakses atau menciptakan peluang kerja. Maka, pelatihan menjadi langkah strategis yang sering disebutkan dalam wawancara sebagai solusi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat, agar mampu bersaing di pasar kerja maupun memulai usaha mandiri.

Kedua, bantuan dari pemerintah, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun dukungan untuk UMKM, menjadi langkah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin ekstrem. Bantuan sosial membantu

masyarakat bertahan secara ekonomi dalam jangka pendek, sementara bantuan kepada pelaku UMKM dianggap sebagai strategi jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Tetapi efektivitas bantuan ini sangat bergantung pada alokasi anggaran yang tepat sasaran.

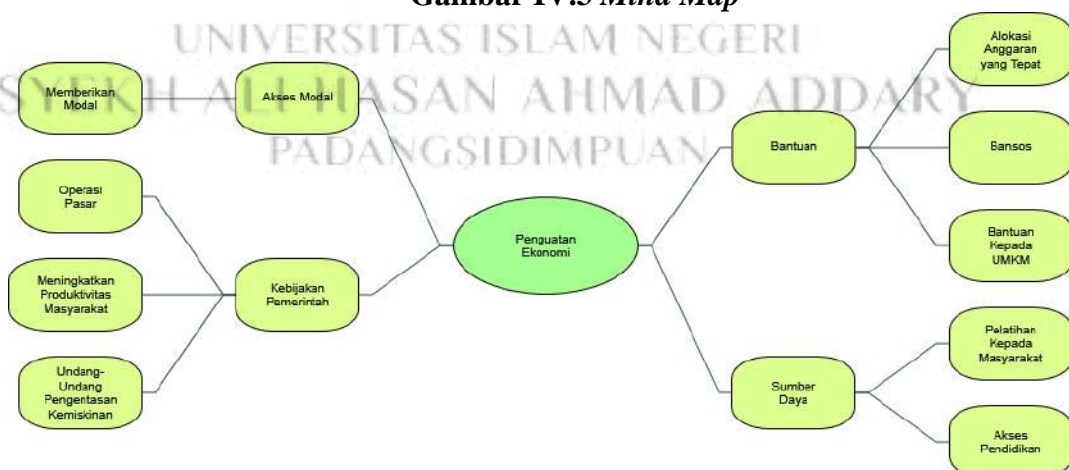
Ketiga, pada aspek masyarakat, ditemukan berbagai tantangan internal yang turut memperparah kemiskinan ekstrem. Di antaranya adalah rendahnya akses terhadap informasi, yang membuat masyarakat tidak mengetahui adanya program bantuan atau pelatihan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Masyarakat juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga fokus mereka hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar, bukan pengembangan ekonomi. Terdapat pula fenomena ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, yang menjadi hambatan dalam membangun kemandirian ekonomi.

Keempat, kebijakan pemerintah juga menjadi poin penting pengentasan kemiskinan ekstrem. Perlu adanya kerjasama yang solid antar-lembaga dan antara pemerintah pusat dan daerah untuk merancang serta melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran. Peningkatan produktivitas masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. Perumusan undang-undang dan regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin sangat dibutuhkan. Operasi pasar juga disebut sebagai langkah tepat yang dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok dan meringankan beban masyarakat miskin.

Kelima, persoalan akses modal menjadi kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha. Banyak masyarakat yang memiliki keinginan berwirausaha, tetapi terbentur oleh ketiadaan modal. Sehingga pemberian modal dinilai sebagai langkah penting untuk mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat. Tetapi, keterbatasan dana dari pemerintah maupun lembaga keuangan membuat akses ini belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin ekstrem di Kota Padangsidimpuan.

3. *Mind Map*

Adapun kerangka berpikir yang terbentuk dalam hasil wawancara setelah dilakukan pengolahan data menggunakan Nvivo 12 dapat dilihat melalui *mind map* sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Nvivo12

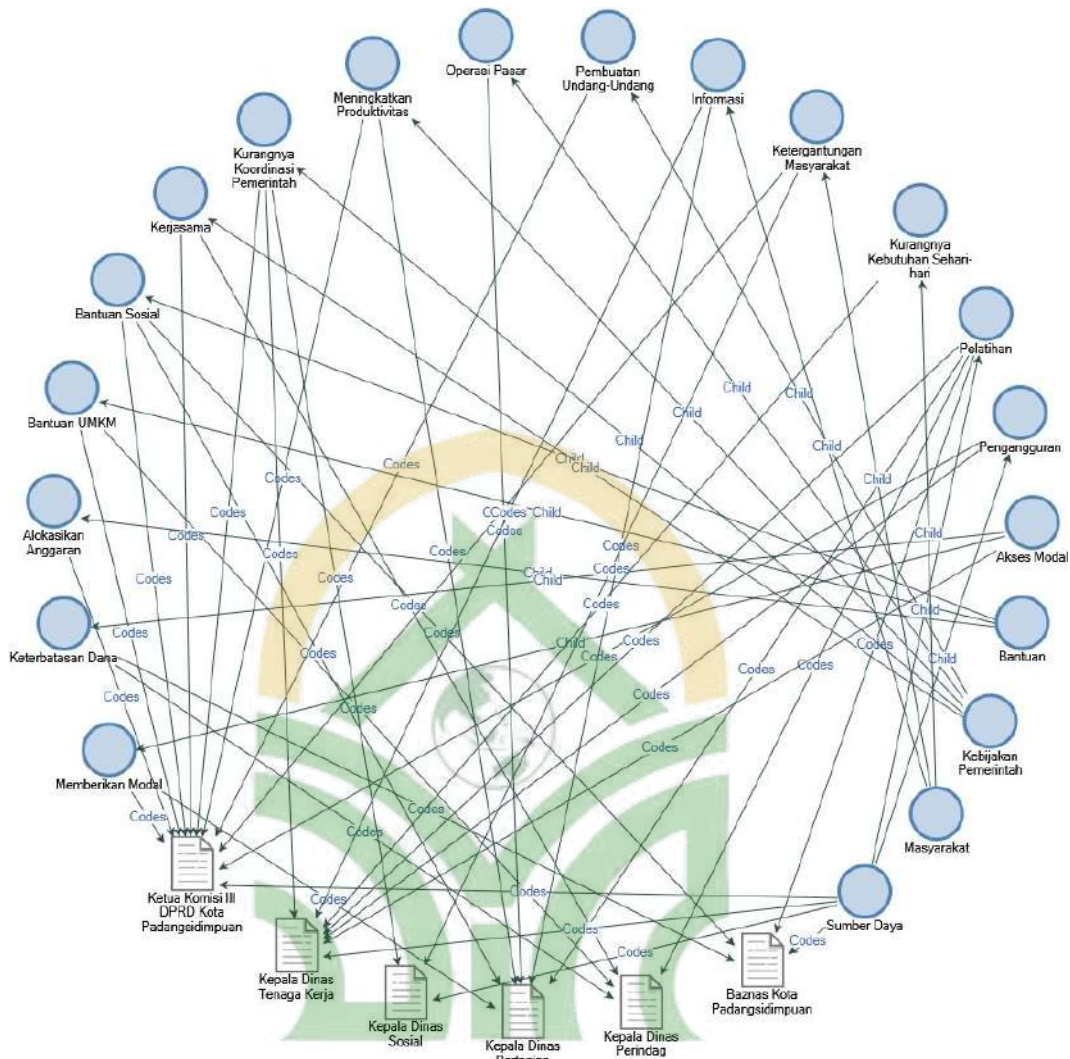
Penguatan ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidimpuan melibatkan empat aspek utama, yaitu

akses modal, kebijakan pemerintah, bantuan, dan sumber daya. Akses modal dibutuhkan untuk mendorong kemandirian usaha masyarakat melalui pemberian modal yang tepat sasaran. Kebijakan pemerintah turut berperan penting melalui operasi pasar, peningkatan produktivitas, dan penerapan regulasi seperti undang-undang yang mengatur tentang pengentasan kemiskinan. Bantuan yang diberikan mencakup alokasi anggaran yang tepat, bantuan sosial (bansos), serta dukungan terhadap pelaku UMKM agar mampu bertahan dan berkembang. Penguatan sumber daya dilakukan melalui pelatihan kepada masyarakat dan peningkatan akses pendidikan sebagai upaya jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan tidak bergantung pada bantuan semata. Keempat aspek ini saling terkait dan menjadi fondasi strategis dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidimpuan.

4. *Project Map*

Adapun hubungan antara *codes* atau *nodes* dengan pernyataan yang diutarakan oleh responden setelah dilakukan pengolahan data menggunakan Nvivo 12 dapat dilihat melalui *project map* sebagai berikut:

Gambar IV.4 *Project Map*



Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Nvivo12

Dari gambar IV.4 diatas dapat diketahui bagaimana hubungannya antara *codes* atau *nodes* berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang diutarakan oleh responden sehingga dapat terlihat *mapping project* yang telah dibuat oleh peneliti.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penyebab Kenaikan Kemiskinan Ekstrem di Padangsidimpuan

Kenaikan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidimpuan pada periode 2022–2023 mencerminkan berbagai tantangan pemerintah daerah dan

masyarakat. Salah satu penyebab utama adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan program-program sosial. Diketahui bahwa banyak tenaga sosial yang belum memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam proses verifikasi dan validasi data. Akibatnya, distribusi bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran, yang kemudian memicu ketimpangan dan kecemburuan sosial. Keterbatasan dalam pelatihan dan supervisi terhadap petugas lapangan juga memperbesar risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Masalah lain yang turut memperparah kondisi adalah tingginya ketergantungan masyarakat miskin ekstrem terhadap bantuan sosial. Banyak keluarga penerima bantuan yang tidak berusaha mandiri karena merasa cukup dengan bantuan yang diberikan, meskipun sifatnya hanya sementara dan terbatas. Rendahnya motivasi ini diperparah dengan fenomena penolakan terhadap *graduasi* yakni penghapusan dari daftar penerima bantuan walaupun secara ekonomi sudah membaik. Lemahnya peran desa dan kelurahan dalam mendukung proses pendataan yang akurat menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem distribusi bantuan yang lebih adil dan efisien.

Pada sektor ketenagakerjaan, kemiskinan ekstrem diperparah oleh rendahnya daya serap lapangan kerja terhadap angkatan kerja dari kelompok miskin. Tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi di tahun 2023, yaitu sebesar 7,57 persen. Tingginya tingkat pengangguran dikarenakan

terjadi pandemic Covid-19 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja secara massal karena pemberlakuan kebijakan pengurangan aktivitas sosial masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa peluang kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja sehingga dapat menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Ketika angkatan kerja berada pada status menganggur maka perekonomian menjadi lesu dan daya beli masyarakat akan menurun. Selain itu angka kriminalitas dapat meningkat seperti pencurian, perampokan dan lain lain sebagai dampak terdesaknya kebutuhan sehari hari.

Secara umum kelompok miskin ekstrem seringkali hanya memiliki pendidikan dasar dan keterampilan yang rendah, sehingga tidak mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Meskipun pemerintah telah mengadakan pelatihan keterampilan, cakupannya masih terbatas dan belum menyentuh seluruh kelompok sasaran secara efektif. Kendala seperti anggaran terbatas, minimnya akses informasi, serta kesiapan dasar peserta turut menghambat efektivitas program pelatihan tersebut.

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, banyak pelaku usaha dari kalangan miskin tidak memiliki akses terhadap modal usaha maupun legalitas, yang membuat mereka sulit berkembang. Kegiatan promosi dan pemasaran, baik secara fisik maupun digital, memang telah dilakukan, namun rendahnya literasi digital dan keterbatasan dana membuat hasilnya belum maksimal. Pada sektor pertanian, mayoritas

masyarakat miskin bekerja sebagai buruh tani atau penggarap lahan, bukan sebagai pemilik. Hal ini menyebabkan mereka tidak tergabung dalam kelompok tani dan tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pertanian seperti pupuk atau bibit.

Lemahnya kebijakan dan koordinasi antarlembaga menjadi penghambat serius dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Belum adanya peraturan daerah (perda) khusus yang mengatur strategi dan langkah konkret dalam menangani kemiskinan ekstrem membuat berbagai program menjadi kurang terarah dan tidak berkelanjutan. Keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, serta lemahnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga sosial seperti BAZNAS semakin memperumit penanganan masalah ini. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dan belum optimalnya regulasi tentang penghimpunan dana sosial menurunkan potensi pemberdayaan ekonomi dari sektor keagamaan. Sehingga penanganan kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis regulasi yang kuat.

Sebagaimana yang dijelaskan Ardito Bhinadi yang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya peran pemerintah sebagai berikut:

“Pemerintah memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui perumusan dan implementasi kebijakan publik yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Peran ini meliputi penyediaan program sosial seperti bantuan langsung tunai, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”¹²¹

¹²¹Ardhito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Deepublish, 2017), hlm. 32.

Bagitu juga dengan penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Tuti Alawiyah dan Farhan Setiawan yang menjelaskan bahwa “faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut: kondisi wilayah, pertumbuhan ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, ketimpangan, rasa ketergantungan, dan kenyamanan dalam zona”.¹²² Selain itu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Primadiana dkk yang mengatakan bahwa “ketiadaan ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur kolaborasi dalam pengurangan kemiskinan, sehingga kerangka kelembagaan untuk mendukung sinergi lintas pihak belum jelas menjadi salah satu penyebab kemiskinan”.¹²³ Begitu juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farros Althof Swandriano dan Muhammad Arif yang mengatakan bahwa “Efektivitas program pemerintah menjadi salah satu penentu naik dan turunnya kemiskinan di Indonesia”.¹²⁴

Kenaikan angka kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang terencana dan optimal. Lemahnya kualitas SDM dalam pelaksanaan program sosial, distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, dan rendahnya efektivitas pelatihan keterampilan menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan

¹²² Tuti Alawiyah and Farhan Setiawan, ‘Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa’, *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15.2 (2021), hlm. 131–154.

¹²³ Primadiana Yunita, Ibnu Asqori Pohan, and Wifka Rahma Syauki, ‘Kinerja Kelembagaan, Relasi Struktural, Dan Koalisi Advokasi Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Malang’, *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8.2 (2023), phlm. 216–31 (hlm. 216), doi:10.36636/dialektika.v8i2.2993.

¹²⁴ Farros Althof Swandriano and Muhammad Arif, ‘Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9.1 (2023), hlm. 71 (hlm. 71), doi:10.35906/jehlm.v9i1.1401.

belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial tanpa diimbangi pemberdayaan yang efektif juga memperlihatkan kurangnya upaya pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Ketiadaan regulasi yang spesifik serta lemahnya koordinasi antar lembaga turut memperkuat bahwa peran strategis pemerintah dalam menyediakan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi belum dijalankan secara optimal dan terintegrasi.

2. Strategi Penguatan Ekonomi Masyarakat

Strategi penguatan ekonomi yang diterapkan di Kota Padangsidimpuan dilakukan melalui pendekatan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi kelompok miskin ekstrem. Pendekatan ini dimulai dari pemberian bantuan sosial dasar seperti sembako, PKH, dan JKN, hingga bantuan ekonomi produktif berupa modal usaha dan alat kerja melalui program UEP dan PENA. Bantuan-bantuan ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, sehingga diharapkan dapat mendorong mereka untuk beralih dari ketergantungan kepada bantuan menjadi individu yang produktif secara ekonomi.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi. Dinas Ketenagakerjaan menyediakan berbagai pelatihan seperti menjahit, tata boga, tata rias, dan servis elektronik yang diarahkan kepada masyarakat usia produktif yang tidak mengenyam pendidikan formal. Selain pelatihan,

informasi peluang kerja juga disebarluaskan melalui program SIAPKERJA, yang mempertemukan pencari kerja dengan penyedia kerja. Kolaborasi dengan sektor swasta juga menjadi langkah strategis dalam membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat miskin ekstrem.

Pada sektor usaha kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berfokus pada pengembangan UMKM melalui pelatihan manajemen usaha, *digital marketing*, dan pengurusan legalitas usaha seperti NIB dan sertifikasi halal. Pemasaran produk juga didukung melalui partisipasi dalam ajang promosi seperti PRSU, INACRAFT dan ICE. Pemerintah memberikan akses terhadap pembiayaan melalui program KUR serta memfasilitasi dan melakukan pendampingan untuk meningkatkan daya saing UMKM agar bisa berkembang ke pasar yang lebih luas. Strategi ini penting untuk mendorong kelompok miskin ekstrem agar memiliki usaha yang berkelanjutan.

Pada sektor pertanian melalui Dinas Pertanian strategi difokuskan pada peningkatan kapasitas petani miskin ekstrem melalui Program Petani Mandiri, Genta Organik, dan Sekolah Lapang Tematik. Petani diberikan bantuan bibit, pupuk, dan pelatihan teknik pertanian untuk mendukung produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian. Pemerintah juga memfasilitasi pasar agar petani mendapatkan harga jual yang layak melalui operasi pasar dan program pangan murah. Perluasan akses terhadap sarana dan prasarana pertanian melalui Pembangunan rehabilitasi irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian dan perbaikan infrastruktur jalan

pertanian. Langkah ini penting mengingat banyak masyarakat miskin ekstrem menggantungkan hidup dari sektor pertanian, meskipun sebagian besar tidak memiliki lahan sendiri.

Pelaksanaan strategi penguatan ekonomi ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, akses informasi yang belum merata, serta lemahnya regulasi pendukung. BAZNAS turut mendukung melalui penyaluran modal usaha dan pelatihan keterampilan, namun keterbatasan dana zakat dan belum adanya peraturan daerah yang mendukung penghimpunan dana secara optimal menjadi tantangan tersendiri. DPRD menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dan dukungan kebijakan serta pengawasan anggaran yang konsisten agar strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Menurut Ibnu Khaldun dalam tulisannya *Muqaddimah*, ia menjelaskan bahwa:

“Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah dan struktur ekonomi yang tidak adil. Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemerintahan yang kuat dan adil, sistem perpajakan yang tidak membebani rakyat, serta ekonomi berbasis produksi dan perdagangan”.¹²⁵

Begitu juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendy Setiawan dan Choirunnisa yang mengatakan “masyarakat memiliki sikap partisipatif dalam kegiatan penyuluhan terkait strategi pengentasan kemiskinan, masyarakat semakin menyadari pentingnya kekuatan lokal

¹²⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah: An Introduction to History*, p. 46.

dalam mengurangi tingkat kemiskinan”.¹²⁶ Begitu dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Inka Nusamuda Pratama “kerjasama kolektif antara Pemerintah dan Swasta mampu menekan angka pengentasan kemiskinan”.¹²⁷ Begitu juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bariyyatin Nafi'ah yang mengatakan bahwa “ZIS memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan”.¹²⁸

Upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial produktif, pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, serta pemberdayaan petani mencerminkan peran aktif negara dalam membangun sistem ekonomi berbasis produksi dan perdagangan. Program-program seperti UEP, PENA, pelatihan keterampilan kerja, serta fasilitasi pemasaran dan legalitas usaha merupakan bentuk konkret dari intervensi kebijakan yang mendukung terciptanya kesejahteraan berbasis keadilan ekonomi di Kota Padangsidimpuan. Dengan adanya hambatan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya regulasi, dan distribusi informasi yang tidak merata menunjukkan bahwa struktur kebijakan belum sepenuhnya kuat dan merata. Hal ini menguatkan bahwa pemerintahan yang adil dan sistemik sangat diperlukan agar strategi pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

¹²⁶ Hendy Setiawan and Choirunnisa Choirunnisa, ‘Penyuluhan Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Masyarakat di Desa Simpar Kabupaten Batang’, *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 2.1 (2023), phlm. 16–23 (hlm. 16), doi:10.34312/ljpm.v2i1.17638.

¹²⁷ Inka Nusamuda Pratama, ‘Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram’, *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10.1 (2023), phlm. 61–77 (hlm. 61), doi:10.59050/jkk.v10i1.221.

¹²⁸ Bariyyatin Nafi'ah, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), hlm. 1.

3. Solusi yang Tepat Bagi Pemerintah

Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidimpuan melalui program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menunjukkan pendekatan yang cukup komprehensif, tidak hanya menyentuh aspek bantuan sosial, tetapi juga menekankan pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Salah satu solusi mendasar yang diungkapkan oleh Dinas Sosial adalah peningkatan akurasi data penerima manfaat, yang menjadi landasan utama dalam memastikan ketepatan sasaran program. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan P3KE, yang dikombinasikan dengan musyawarah desa, dokumentasi visual, dan data pendukung lainnya, menjadi langkah penting untuk menghindari tumpang tindih bantuan serta memastikan bahwa intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Sehingga di sinilah pentingnya peran perangkat desa dan kelurahan dalam proses pendataan dan edukasi masyarakat.

Penguatan pelatihan kerja berbasis kompetensi menjadi solusi krusial untuk memutus rantai kemiskinan. Dinas Ketenagakerjaan menekankan pentingnya pelatihan bagi kelompok usia produktif yang tidak bekerja atau tidak melanjutkan pendidikan. Pelatihan seperti ini ketika diintegrasikan dengan data P3KE, akan lebih efektif karena langsung menyasar masyarakat miskin ekstrem dengan pendekatan yang terarah. Selain itu, sistem digital seperti SIAPKERJA menjadi sarana strategis untuk memperluas akses

informasi tentang lowongan kerja dan pelatihan, meskipun kesadaran dan literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan.

Dukungan terhadap pelaku UMKM juga menjadi fokus utama solusi kemiskinan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya mendorong legalitas dan daya saing produk UMKM miskin ekstrem melalui pelatihan pemasaran digital, fasilitasi sertifikasi halal, dan penguatan akses permodalan. Dengan strategi ini, pelaku usaha kecil dapat terintegrasi ke dalam rantai pasar yang lebih luas dan lebih kompetitif.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat landasan hukum dan regulasi, sebagaimana disarankan oleh DPRD Kota Padangsidimpuan, dengan menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Regulasi ini penting sebagai payung hukum dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan program lintas sektor. Alokasi anggaran yang berkeadilan serta penguatan fungsi pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas program.

Dari sisi kelembagaan keagamaan, BAZNAS berkontribusi melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Tetapi, untuk memperluas dampaknya, diperlukan penguatan regulasi terkait ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) serta peningkatan kesadaran masyarakat dan ASN untuk menunaikan zakat secara terstruktur. Dengan basis dana ZIS yang kuat, bantuan yang bersifat produktif seperti program-program pelatihan dan

modal usaha dapat lebih maksimal dan banyak menjangkau keluarga miskin ekstrem.

Solusi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui pendekatan multi-level dan multi-aktor menunjukkan arah yang tepat. Tetapi, tantangan utama yang masih dihadapi adalah soal keterbatasan pendanaan, kurangnya sinergi antar instansi atau kolaborasi, serta perlunya peran aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil.

Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqh Zakat* juga menekankan hal sebagai berikut:

“Zakat bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga solusi sosial-ekonomi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sarana redistribusi kekayaan yang efektif untuk memberdayakan kaum *dhuafa* dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata”.¹²⁹

Begitu juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh “Kerjasama kolektif antara Pemerintah dan Swasta mampu menekan angka pengentasan kemiskinan”.¹³⁰ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rafi Aufa yang mengatakan bahwa “*social enterprise* hadir sebagai pihak eksternal yang berperan membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan”.¹³¹ Penelitian yang dilakukan oleh Novi Dianita Sari dkk

¹²⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Its Rulings and Philosophies in the Light of the Qur'an and Sunnah.*, p. 65.

¹³⁰ Hendy Setiawan and Choirunnisa Choirunnisa, ‘Penyuluhan Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Masyarakat di Desa Simpar Kabupaten Batang’, *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 2.1 (2023), phlm. 16–23 (hlm. 16), doi:10.34312/ljpm.v2i1.17638.

¹³¹ Rafi Aufa Mawardi and Muhammad Rizki Pratama, ‘Peran Social Enterprise Sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia’, *Jurnal Studi Inovasi*, 3.1 (2023), hlm. 1, doi:10.52000/jsi.v3i1.130.

mengatakan bahwa “kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah dan presiden cukup efektif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia”.¹³²

Upaya Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui program P3KE sejalan dengan pemikiran Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqh Zakat*, yang menekankan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, melainkan instrumen sosial-ekonomi yang mampu mengatasi kemiskinan secara struktural. Kontribusi BAZNAS melalui zakat produktif untuk pelatihan dan pemberian modal usaha kepada kelompok miskin ekstrem mencerminkan fungsi zakat sebagai sarana redistribusi kekayaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qardawi, efektivitas zakat bergantung pada sistem pengelolaan yang baik dan dukungan regulasi yang memadai. Sehingga, tantangan seperti minimnya kesadaran masyarakat dan ASN untuk berzakat, serta ketiadaan peraturan daerah yang kuat tentang ZIS, menunjukkan bahwa potensi zakat belum dioptimalkan secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi. Maka, penguatan peran kelembagaan zakat yang terintegrasi dalam strategi multi-sektor dan berbasis data seperti P3KE menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi kelompok dhuafa di Kota Padangsidempuan.

¹³² Novi Dianita Sari and others, ‘Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan Di Era Pemerintahan Jokowi’, *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3.2 (2024), phlm. 14–25 (hlm. 14), doi:10.58192/ebismen.v3i2.2112.

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi ruang lingkup dan kedalaman hasil analisis yang diperoleh. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu terbatas dan hanya difokuskan pada Kota Padangsidempuan. Sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi berbeda.
2. Peneliti sangat bergantung pada data dari instansi pemerintah seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang bersifat dinamis dan terus diperbarui. Adanya perbedaan pembaruan data antar lembaga dapat menyebabkan perbedaan dalam penentuan sasaran program.
3. Wawancara dilakukan hanya dengan beberapa pihak kunci seperti Kepala Dinas dan Ketua DPRD/BAZNAS. Pandangan masyarakat penerima manfaat program belum secara langsung digali secara mendalam, sehingga persepsi dari kelompok sasaran utama kurang tereksplorasi dalam penelitian ini.
4. Peneliti belum dapat mengakses laporan lengkap tentang evaluasi dampak program P3KE secara kuantitatif, sehingga analisis lebih banyak bersifat kualitatif berdasarkan persepsi dan strategi yang direncanakan oleh pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kenaikan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidimpuan disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk lemahnya kualitas SDM dalam pelaksanaan program sosial, distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, serta rendahnya partisipasi desa dan kelurahan dalam pendataan. Minimnya keterampilan kerja, terbatasnya akses modal dan legalitas usaha, serta lemahnya koordinasi antar lembaga memperparah kondisi ini. Kurangnya regulasi khusus dan lemahnya kesadaran zakat turut menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem secara efektif.
2. Strategi penguatan ekonomi di Kota Padangsidimpuan mencakup bantuan sosial dasar hingga bantuan ekonomi produktif yang diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat miskin ekstrem. Pelatihan keterampilan kerja, pengembangan UMKM, dan penguatan sektor pertanian menjadi fokus utama. Pelaksanaan strategi ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, akses informasi yang belum merata, dan regulasi yang belum optimal. Peran BAZNAS dan kolaborasi lintas OPD sangat penting untuk mendukung strategi yang efektif.

3. Solusi penanggulangan kemiskinan ekstrem memerlukan peningkatan akurasi data, pelatihan kerja berbasis kompetensi, dukungan terhadap UMKM, dan penguatan regulasi melalui peraturan daerah. Pendekatan berbasis kolaborasi multi-aktor, seperti dukungan dari BAZNAS dan keterlibatan sektor swasta, menjadi kunci keberhasilan program. Tetapi tantangan seperti keterbatasan pendanaan, sinergi antarinstansi yang lemah, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan yang perlu segera diatasi agar solusi dapat berjalan dengan efektif.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan peneliti di atas mengenai penyebab, strategi penguatan ekonomi, dan solusi atas kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan, maka implikasi dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a. Penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis tentang kemiskinan ekstrem, khususnya dalam konteks perkotaan di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi individu, tetapi juga oleh struktur kebijakan yang tidak adil, lemahnya tata kelola pemerintahan, serta minimnya kolaborasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan teori Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, yang menyatakan bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang timpang, pajak yang memberatkan, serta kelemahan dalam fungsi pemerintahan. Sehingga, pendekatan multidimensional dalam mengkaji kemiskinan, yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan

kelembagaan, menjadi sangat relevan dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem saat ini.

- b. Penelitian ini juga memperkuat teori pemberdayaan (*empowerment theory*) yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu dan komunitas sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Strategi yang menggabungkan pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, legalitas usaha, serta pemberdayaan komunitas lokal menunjukkan bahwa solusi yang bersifat top-down perlu dilengkapi dengan inisiatif bottom-up dari masyarakat sendiri.

2. Implikasi Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran strategis pemerintah sangat krusial, sebagaimana ditegaskan oleh Ardito Bhinadi, yang menyatakan bahwa kebijakan publik harus terencana, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Sehingga, Pemerintah Kota Padangsidempuan perlu menyusun rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan berdasarkan strategi peningkatan pendapatan masyarakat, kebijakan berbasis data valid dan akurat, meningkatkan koordinasi antarlembaga dan antarlevel pemerintahan, Menggagas kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga sosial sebagaimana dikemukakan oleh Inka Nusamuda Pratama dan Rafi Aufa, yang menekankan bahwa kerjasama kolektif dan social enterprise dapat mempercepat pengentasan kemiskinan.
- b. Dibutuhkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit mengatur strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,

sebagaimana temuan Primadiana dkk, bahwa ketiadaan kerangka hukum yang jelas menghambat kolaborasi lintas sektor.

3. Implikasi Sosial

- a. Penelitian ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek perubahan sosial. Hendy Setiawan dan Choirunnisa menekankan pentingnya sikap partisipatif masyarakat dalam setiap program pengentasan kemiskinan. Hal ini perlu ditunjang oleh peningkatan literasi ekonomi, motivasi berwirausaha, dan kepercayaan diri masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
- b. Penguatan lembaga keagamaan seperti BAZNAS menjadi penting, sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf Al-Qardawi dalam *Fiqh Zakat*, bahwa zakat adalah instrumen strategis untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan jika dikelola secara produktif. Pengelolaan zakat yang diarahkan pada program ekonomi produktif akan meningkatkan solidaritas sosial dan ketahanan ekonomi umat, sebagaimana didukung oleh temuan Bariyyatin Nafi'ah.

C. Saran

Berdasarkan implikasi penelitian di atas, adapun beberapa saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, serta pihak kecamatan dan kelurahan perlu memperkuat kerja sama dan integrasi dalam menjalankan program penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan adanya koordinasi yang solid, potensi

tumpang tindih program dapat dihindari dan sasaran intervensi menjadi lebih akurat. Kolaborasi dibutuhkan untuk terus mendorong lahirnya inovasi-inovasi dibidang pengetahuan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sehingga pengentasan kemiskinan dapat tercapai, formulasi kebijakan yang ideal dan tepat sasaran.

2. Pemerintah Daerah diharapkan rutin memperbarui data kemiskinan dengan melibatkan unsur pemerintahan paling bawah seperti perangkat desa, RT/RW, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini akan meningkatkan keakuratan data penerima manfaat dan memastikan bantuan tepat sasaran.
3. Disarankan agar segera disusun dan diberlakukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus strategi penghapusan kemiskinan ekstrem. Perda tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan program, pengalokasian anggaran, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.
4. Perluasan program zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif perlu diarahkan kepada masyarakat miskin ekstrem yang memiliki potensi kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan langsung.
5. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data primer direkomendasikan untuk memperkaya pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan potensi masyarakat miskin ekstrem, sehingga program intervensi dapat lebih tepat guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Tuti, and Farhan Setiawan, 'Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa', *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15.2 (2021), pp. 131–54, doi:10.24815/jsu.v15i2.22392
- Alexander Lucas Riyadi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Andi Offset, 2016)
- Ardhito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Deepublish, 2017)
- Arief, Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Kencana, 2010)
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Rineka Cipta, 2016)
- Aziz, Moh. Ali, *Pendekatan Sosio-Kultural Dalam Pemberdayaan Masyarakat*”, *Dalam Suhartini, Dkk (Ed.), Model-Model Pemberdayaan Masyarakat* (Pustaka Pesantren : Distribusi, LKiS Pelangsi Aksara, 2005)
- Cahyani, Utari Evy, Itsla Yunisva Aviva, and Aisa Manilet, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga', *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5.1 (2019), pp. 39–58, doi:10.24952/tazkir.v5i1.1331
- Departemen Agama RI, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bintang Indonesia, 2022)
- Hadi, MK, 'Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab', *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, no. Query date: 2022-10-18 15:36:38 (2021) <<http://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/QIIMJ/article/view/1>>
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pustaka, 2017)
- Hasbullah, Moeflich, *Islam Dan Transformasi Masyarakat Nusantara* (Kencana, 2021)
- Heryani, Hesty, Arif Rahman Hakim, and Panggih Prabowo Rona Saputra, 'Pendampingan Dari Diagnosis Implementasi Green House Level Medium Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Ekstrim', *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 3.3 (2024), p. 555, doi:10.20527/ilung.v3i3.11239
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Humaniora Utama Press, 2010)

- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah: An Introduction to History*, Terjemahan Franz Rosenthal (Princeton University Press, 1967)
- Ja'far Nasution, and others, 'Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner', 1.5 (2022), pp. 271–80
- Joko Widodo, *Inpres Nomor 4 Tahun 2022*, 2022
- Kurniawan, Rizqi Hary, and others, 'Problematika Anak Tidak Sekolah (ATS) Sebagai Faktor Pemicu Kemiskinan Ekstrim Dan Stunting', *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.2 (2022), pp. 70–74, doi:10.32764/abdimaspen.v3i2.2501
- Machendrawaty, Nanih, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi*, Cet. 1 (Remaja Rosdakarya, 2001)
- Mawardi, Rafi Aufa, and Muhammad Rizki Pratama, 'Peran Social Enterprise Sebagai Inovasi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Studi Inovasi*, 3.1 (2023), doi:10.52000/jsi.v3i1.130
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2013)
- M.S.I, Muh Izza, *EKONOMI MIKRO: Pendekatan Ideologis Islam* (Penerbit NEM, 2021)
- Mufti, Arief, and Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa Ekonomi Berbasis Syariah*, 2nd edn (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2014)
- Muhadjir Efendy, *Kepmenko PMK No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedum P3KE*, 2022
- Nafi'ah, Bariyyatin, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), doi:10.29040/jiei.v7i2.2206
- Noor, Henry Faizal, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis, Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* (Indeks, 2009)
- Novi Dianita Sari, and others, 'Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan Di Era Pemerintahan Jokowi', *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3.2 (2024), pp. 14–25, doi:10.58192/ebismen.v3i2.2112
- Nugroho, Agus Eko, and others, 'Analisis Permasalahan Kemiskinan', in *Anti Kemiskinan Reproduksi Modal Sosial (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan)*, 1st edn (LPPI Press, 2010)

- Pratama, Inka Nusamuda, 'Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram', *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10.1 (2023), pp. 61–77, doi:10.59050/jkk.v10i1.221
- Qureshi Khan, Naila Iqbal, 'Waqf and Development: A Study of Economic Potential of Waqf in Bhopal, Madhya Pradesh', in *Advances in Finance, Accounting, and Economics*, ed. by Buerhan Saiti and Adel Sarea (IGI Global, 2020), pp. 72–99 <<http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-7998-1245-6.ch005>>
- Setiawan, Albi Anggito & Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV. Jejak, 2018)
- Setiawan, Hendy, and Choirunnisa Choirunnisa, 'Penyuluhan Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Masyarakat Di Desa Simpar Kabupaten Batang', *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 2.1 (2023), pp. 16–23, doi:10.34312/ljpm.v2i1.17638
- Setyosari, Pujani, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Kencana, 2012)
- Sherraden, Michael, *Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, terj Siroj (Raja Grafindo Persada, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Alfabeta, 2012)
- , *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif R&D* (Alfabeta, 2012)
- Suryani, Dyah, and Lailatul Fitriani, 'Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.1 (2022), pp. 43–62, doi:10.37812/aliqtishod.v10i1.307
- Swandriano, Farros Althof, and Muhammad Arif, 'Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus', *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9.1 (2023), p. 71, doi:10.35906/jep.v9i1.1401
- Tundiles Kogoya, Ventje Kasenda, and Fanley N Pangemanan, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Nungawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua', 3.1 (2023)
- Wulandari, Felinda, Yamardi Yamardi, and Titin Rohayatin, 'EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PADALARANG

KABUPATEN BANDUNG BARAT’, *Jurnal Caraka Prabhu*, 4.1 (2020), pp. 31–46, doi:10.36859/jcp.v4i1.206

Yamani, Achmad Zaki, Arif Wirawan Muhammad, and Muhammad Nur Faiz, ‘Penguatan Ekonomi Lokal Pada Pelaku UMKM Berbasis Digital Di Desa Winduaji Kabupaten Brebes’, *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 1.1 (2019), pp. 24–28, doi:10.35970/madani.v1i1.29

Yunita, Primadiana, Ibnu Asqori Pohan, and Wifka Rahma Syauki, ‘Kinerja Kelembagaan, Relasi Struktural, Dan Koalisi Advokasi Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Malang’, *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8.2 (2023), pp. 216–31, doi:10.36636/dialektika.v8i2.2993

Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Its Rulings and Philosophies in the Light of the Qur’an and Sunnah*. (Dar Al-Tawhid, 1997)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan Kepada Kepala Dinas Sosial Daerah Kota Padangsidempuan

1. Apa saja program prioritas Dinas Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana mekanisme identifikasi dan pendataan masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem?
3. Apa kendala utama dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal?
4. Apakah ada kolaborasi dengan lembaga swasta atau LSM untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem?
5. Bagaimana efektivitas bantuan sosial dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrem?
6. Bagaimana Dinas Sosial memonitor dan mengevaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan?
7. Apakah program pelatihan atau pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian dari strategi Dinas Sosial?
8. Sejauh mana alokasi anggaran daerah mencukupi untuk program pengentasan kemiskinan?
9. Apa peran komunitas lokal dalam mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem?
10. Apakah Dinas Sosial memiliki inovasi terbaru untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem?

Pertanyaan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padangsidempuan

1. Apa langkah-langkah yang telah diambil Dinas Tenaga Kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana kondisi lapangan kerja bagi masyarakat miskin ekstrem di daerah ini?
3. Apakah ada pelatihan keterampilan kerja yang dikhususkan bagi masyarakat miskin ekstrem?
4. Apa jenis pekerjaan atau sektor yang paling potensial untuk menyerap

tenaga kerja miskin ekstrem?

5. Bagaimana upaya Dinas dalam menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja?
6. Apakah ada program kewirausahaan yang ditawarkan untuk membantu masyarakat miskin ekstrem?
7. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan sektor swasta untuk membuka peluang kerja?
8. Apa tantangan utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia miskin ekstrem?
9. Apakah ada insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan masyarakat dari kelompok miskin ekstrem?
10. Bagaimana Dinas mengevaluasi dampak program ketenagakerjaan terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem?

Pertanyaan Kepada Kepala Dinas Perindag Daerah Kota Padangsidimpuan

1. Apa program unggulan Dinas Perindag dalam mendorong pertumbuhan UMKM untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem?
2. Bagaimana Dinas Perindag mendukung pemasaran produk lokal dari masyarakat miskin ekstrem?
3. Apakah ada pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat miskin ekstrem?
4. Bagaimana akses masyarakat miskin ekstrem terhadap modal usaha?
5. Apakah ada program khusus untuk mengintegrasikan produk UMKM ke pasar yang lebih luas?
6. Bagaimana Dinas Perindag bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperkuat ekonomi masyarakat miskin ekstrem?
7. Apakah ada program digitalisasi UMKM yang ditujukan untuk masyarakat miskin ekstrem?
8. Bagaimana Dinas menangani hambatan regulasi yang dihadapi UMKM dari kelompok miskin ekstrem?
9. Sejauh mana kemitraan dengan pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan melalui sektor perdagangan?
10. Bagaimana dampak dari program-program Dinas Perindag terhadap

kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem?

Pertanyaan Kepada Kepala Dinas Pertanian Daerah Kota Padangsidempuan

1. Apa program prioritas Dinas Pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani miskin ekstrem?
2. Bagaimana akses masyarakat miskin ekstrem terhadap bantuan atau subsidi pertanian?
3. Apakah ada pelatihan atau pendampingan teknis untuk petani dari kelompok miskin ekstrem?
4. Bagaimana Dinas Pertanian membantu petani miskin ekstrem meningkatkan produktivitas lahan?
5. Apakah ada program diversifikasi pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani miskin?
6. Bagaimana Dinas mendukung akses petani ke pasar untuk menjual hasil pertanian mereka?
7. Apakah Dinas memberikan perhatian khusus pada petani wanita atau kelompok rentan dalam pengentasan kemiskinan?
8. Bagaimana program irigasi dan infrastruktur pertanian mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem?
9. Apakah ada inovasi teknologi pertanian yang diperkenalkan untuk petani miskin ekstrem?
10. Bagaimana Dinas mengevaluasi keberhasilan program pertanian dalam pengentasan kemiskinan?

Pertanyaan Kepada Kepala Dinas Pertanian Daerah Kota Padangsidempuan

1. Bagaimana peran DPRD dalam mendorong kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Padangsidempuan?
2. Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk program pengentasan kemiskinan?
3. Bagaimana DPRD mengevaluasi implementasi program pengentasan kemiskinan di daerah?
4. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan ekstrem?

5. Apakah DPRD berperan dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta?
6. Bagaimana DPRD memantau transparansi penggunaan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan?
7. Apakah DPRD mendorong adanya regulasi khusus untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem?
8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait program pengentasan kemiskinan?
9. Apa rekomendasi DPRD untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem?
10. Bagaimana DPRD memastikan kesinambungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DOKUMENTASI





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN